

LAPORAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2021



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mendukung pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun-tahun

selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja tahun 2021 akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan perencanaan program/kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang.

Pamekasan, 14 Februari 2022

**KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN**



MUHARRAM, ST.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680330 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	24
D. Landasan Hukum	25
E. Sistematika	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	27
A. Rencana Strategis	27
B. Rencana Kinerja Tahun 2021	35
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	52
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	54
B. Realisasi Anggaran	72
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	74
BAB IV PENUTUP.....	84
LAMPIRAN	87
- Matriks Renstra 2018-2023 dan Perubahannya	87
- Dokumen IKU Kepala Perangkat Daerah dan Perubahannya	123
- Matriks Renja 2021 dan Perubahannya	127
- PK Kepala Perangkat Daerah dan Perubahannya	141
- Laporan Evaluasi Hasil Renja s.d. Triwulan IV	147

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja.....	30
Tabel 2.2	: Indikator Kinerja Utama (IKU).....	32
Tabel 2.3	: Rencana Kinerja Tahun 2021	35
Tabel 2.4	: Perjanjian Kinerja (Awal) Tahun 2021	37
Tabel 2.5	: Program dan Kegiatan (Awal) Tahun 2021	38
Tabel 2.6	: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021	45
Tabel 2.7	: Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021...	46
Tabel 3.1	: Pengkategorian Capaian Kinerja	53
Tabel 3.2	: Capaian Indikator Kinerja Utama	55
Tabel 3.3	: Perbandingan Capaian Kinerja.....	57
Tabel 3.4	: Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	60
Tabel 3.5	: Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional.....	61
Tabel 3.6	: Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	62
Tabel 3.7	: Analisis Keberhasilan, Kegagalan Program dan Kegiatan.....	64
Tabel 3.8	: Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	72
Tabel 3.9	: Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	75
Tabel 3.10	: Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

B. Sekretariat membawahi :

1) Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset

C. Bidang Perumahan Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Tata Bangunan membawahi:

1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan dan Bina Konstruksi;

2) Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan;

3) Seksi Prasarana, Sarana Utilitas Umum dan Tata Bangunan.

D. Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih membawahi:

- 1) Seksi Pendataan, Perencanaan, Kawasan Permukiman dan Sanitasi ;
- 2) Seksi Pemanfaatan, Pengendalian Kawasan Permukiman Dan Air Bersih ;
- 3) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.

Uraian Berdasarkan dari Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan, keuangan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, perpustakaan dan kearsipan, serta

monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas perencanaan, evaluasi, pelaporan kinerja dan anggaran, Sekretariat mempunyai Fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan aset, serta kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- c. Pengelolaan urusan penatalaksanaan hukum, informasi kesehatan, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan peraturan perundangan – undangan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta program dan kegiatan Dinas;
- f. Pelaporan kinerja dan keuangan Dinas;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Bidang ; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1. Sub Bagian Perencanaan, Umum, dan Kepegawaian

Sub bagian perencanaan, umum, dan kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas ;
- b. Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan ;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris Dinas ;
- d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan Kantor ;
- e. Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- f. Melaksanakan analisa kebutuhan, dan pengadaan barang kebutuhan Dinas ;
- g. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Dinas ;

- h. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karir pegawai usaha, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian ;
- i. Menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas ;
- j. Menyusun perencanaan kinerja, program, dan kegiatan Dinas ;
- k. Menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program dan kegiatan Dinas ;
- l. Menyusun laporan kinerja, program, dan kegiatan Dinas ; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan dinas ;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai ;
- c. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset dinas ;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Dinas ; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Tata Bangunan

Bidang Perumahan dan Tata Bangunan mempunyai tugas merencanakan pengembangan dan pengendalian perumahan, tata bangunan, dan tata konstruksi. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Tata Bangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
- b. Pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;

- c. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
- d. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- e. Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten;
- f. Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
- g. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- h. Urusan penyelenggaraan PSU perumahan;
- i. Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- j. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan bidang pendataan, sosialisasi dan persiapan, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi, rekomendasi izin lokasi penanaman modal, rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan, penyelesaian sengketa tanah dan pemberian ganti rugi, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi, pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi, pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus, penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung, dan penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan;
- l. Supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan;
- m. Analisis data dan informasi kinerja Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan;
- n. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan;

- o. Validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
- p. Penilaian kinerja bawahan;
- q. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan;
- r. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- s. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah Negara beserta lingkungannya dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ada;
- t. Pembangunan dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah Negara serta penataan bangunan dan lingkungannya;
- u. Pembinaan teknis penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dan rumah Negara beserta lingkungannya;
- v. Pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah Negara beserta lingkungannya; dan
- w. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Perumahan Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Tata Bangunan dibantu oleh 3 Seksi yaitu Seksi Perencanaan, Pengendalian Perumahan dan Bina Konstruksi, Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan, dan Seksi Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Tata Bangunan. Adapun tugas dari ketiga seksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan

Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan rehabilitasi rumah bagi korban bencana;
- b. Melaksanakan pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana;
- c. Melaksanakan pembangunan rumah bagi korban bencana;

- d. Melaksanakan pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten;
- e. Melaksanakan operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten;
- f. Melaksanakan pembagian rumah bagi korban bencana kabupaten/kota atau relokasi program kabupaten;
- g. Melaksanakan penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota atau relokasi program kabupaten;
- h. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun;
- i. Melaksanakan penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
- j. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- k. Menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan;
- l. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi, pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi, pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus, penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- m. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data seksi penyediaan dan pembiayaan perumahan;
- n. Melaksanakan penyusunan site plan dan/atau ded rumah korban bencana atau relokasi program, pengadaan lahan dan pembangunan rumah bagi korban bencana, dan operasional pemeliharaan lingkungan perumahan;
- o. Melaksanakan distribusi rumah bagi korban bencana dan relokasi, serta pemenuhan tata usaha serah terima rumah bagi korban;

- p. Melaksanakan fasilitasi penatausahaan dan pemanfaatan, dan pengelolaan kelembagaan pemilik rumah susun;
- q. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan;
- r. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- s. Menilai kinerja bawahan;
- t. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- u. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- v. Melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Tata Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Tata Bangunan

Seksi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Tata Bangunan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan perencanaan penyediaan PSU perumahan;
- b. Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- d. Menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan seksi penyediaan dan pembiayaan perumahan;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang penyelenggaraan PSU perumahan;
- f. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- g. Melaksanakan penanggulangan bencana/tanggap darurat;
- h. Menerapkan kebijakan perencanaan dan pengendalian penyediaan PSU perumahan;

- i. Menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
- j. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- k. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- l. Menilai kinerja bawahan;
- m. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- n. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. Menyusun bahan pembinaan teknis perencanaan, bantuan teknis penyusunan program, dan pembiayaan bangunan gedung dan rumah Negara beserta lingkungannya, pembinaan teknis dan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah, serta pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya;
- p. Menyusun bahan kebijakan pengaturan dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung beserta lingkungannya;
- q. Menyusun bahan pembinaan teknis pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan bangunan gedung beserta lingkungannya;
- r. Menyusun bahan pengawasan terhadap pelaksanaan perundang – undangan, pedoman, dan standar teknis pembangunan gedung beserta lingkungannya ; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, dan Tata Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan dan Bina Konstruksi

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan dan Bina Konstruksi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten;

- b. Melaksanakan identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
- c. Melaksanakan pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani
- d. Melaksanakan pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana
- e. Melaksanakan pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten;
- f. Melaksanakan pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus
- g. Melaksanakan sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana
- h. Melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan
- i. Melaksanakan sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP
- j. Melaksanakan pembentukan dan pelatihan tim satgas, tim pendamping dan fasilitator
- k. Melaksanakan rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana
- l. Melaksanakan koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan
- m. Melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik;
- n. Melaksanakan penguatan dan pembinaan kepada BLU/BUMD untuk penyelenggaraan rumah sederhana;
- o. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan;
- p. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPDBU) perumahan umum/rumah susun umum;

- q. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha;
- r. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perumahan;
- s. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang pendataan, sosialisasi dan persiapan, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi, rekomendasi izin lokasi penanaman modal, rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan, penyelesaian sengketa tanah dan pemberian ganti rugi;
- t. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perumahan;
- u. Melaksanakan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program, serta identifikasi lahan potensial lokasi relokasi perumahan;
- v. Melaksanakan pengumpulan data rumah korban bencana dan data tingkat kerusakan rumah akibat bencana;
- w. Melaksanakan pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi;
- x. Pelaksanaan sosialisasi mekanisme dan syarat teknis calon penerima rumah bagi korban bencana dan mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan;
- y. Pemrosesan dan penyiapan bahan rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan izin lokasi penanaman modal;
- z. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pengendalian kegiatan perumahan prasarana sarana dan utilitas umum;
- aa. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- bb. menilai kinerja bawahan;

- cc. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- dd. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- ee. Menyusun bahan kebijakan pembinaan jasa konstruksi dan kerjasama teknis dengan lembaga pengembangan jasa konstruksi daerah dan asosiasi terkait ;
- ff. Melaksanakan penyebarluasan perundang-undangan bangunan gedung dan jasa konstruksi kepada para penyelenggara pembangunan ;
- gg. Melaksanakan penyusunan standarisasi teknis dan memberikan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kemampuan teknologi dan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi ;
- hh. Menyusun bahan evaluasi kinerja badan usaha jasa konstruksi dan pengawasan dalam rangka tertib penyelenggaraan jasa konstruksi ;
- ii. Melaksanakan pengembangan sistem informasi dan penelitian bidang jasa konstruksi;
- jj. Melaksanakan pendaftaran dan penetapan fungsi bangunan gedung dan rumah Negara beserta lingkungannya ;
- kk. Menyusun bahan pembinaan teknis pengalihan status dan hak bangunan gedung dan rumah Negara beserta lingkungannya; dan
- ll. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Tata Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih

Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis pengelolaan di bidang Kawasan Permukiman,

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- c. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- d. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten;
- e. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil;
- f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan bidang fasilitasi penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan pelaksanaan registrasi dan sertifikasi orang atau badan hukum yang merancang dan merencanakan rumah dan PSU dengan kemampuan kecil;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang kawasan permukiman;
- h. Supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang kawasan permukiman;
- i. Analisis data dan informasi kinerja bidang kawasan permukiman;
- j. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang kawasan permukiman;
- k. Validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;

- l. Penilaian kinerja bawahan;
- m. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran bidang kawasan permukiman;
- n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. Perencanaan, penataan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian serta penyehatan lingkungan permukiman;
- p. Fasilitasi dalam rangka perencanaan penyusunan program, kebijakan, dan strategi peningkatan dan pemeliharaan serta penyehatan lingkungan permukiman;
- q. Pengendalian, fasilitasi, pembinaan, dan pemberian bantuan teknis dalam rangka peningkatan peran serta stakeholder dalam pengembangan, pemeliharaan, dan penyehatan lingkungan permukiman ; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Kawasan Permukiman Sanitasi dan Air Bersih dibantu oleh 3 Kepala Seksi, yaitu Seksi Pendataan Perencanaan Kawasan Permukiman dan Sanitasi, Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, dan Seksi Pemanfaatan Pengendalian Kawasan Permukiman dan Air Bersih, Adapun tugas dari ketiga seksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Seksi Pendataan Dan Perencanaan Kawasan Permukiman dan Sanitasi

Seksi Pendataan Dan Perencanaan Kawasan Permukiman dan Sanitasi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik;
- b. Melaksanakan penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;

- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
- d. Melaksanakan survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh;
- e. Melaksanakan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- f. Melaksanakan pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh;
- g. Melaksanakan penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
- h. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
- i. Melaksanakan penyusunan/review/legalisasi kebijakan bidang PKP;
- j. Melaksanakan penyusunan rencana tapak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED) peremajaan/pemugaran permukiman kumuh;
- k. Melaksanakan pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh;
- l. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang fasilitasi penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
- n. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data seksi pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;

- o. Melaksanakan pendataan dan verifikasi; penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh;
- p. Melaksanakan pelaksanaan pemrosesan dan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik;
- q. Melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok swadaya masyarakat untuk pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- r. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- s. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- t. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
- u. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- v. Menilai kinerja bawahan;
- w. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- x. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- y. Menyusun bahan kebijakan, strategi, dan perencanaan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi dalam rangka penyehatan lingkungan permukiman;
- z. Melaksanakan fasilitasi penyiapan program pembangunan serta fasilitasi perencanaan dan pemberian izin pembangunan prasarana dan sarana sanitasi;
- aa. Menyusun bahan petunjuk teknis perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan serta melaksanakan pembangunan fisik prasarana dan sarana sanitasi ;
- bb. Menyusun bahan pengawasan, pengendalian, pemberian bantuan teknis, dan pembinaan manfaat prasarana dan sarana sanitasi, serta

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan kriteria;

- cc. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis pengembangan sanitasi, fasilitasi pembinaan teknis dan manajemen terhadap penyelenggara penyediaan sanitasi, serta fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan prasarana dan sarana sanitasi;
- dd. Menyusun bahan evaluasi kinerja pelayanan penyelenggaraan sanitasi dalam rangka penyehatan lingkungan permukiman ; dan
- ee. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman dan Air Bersih

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman dan Air Bersih mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh;
- b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pemanfaatan Dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program permukiman kumuh, pelaksanaan registrasi dan rekomendasi sertifikasi orang atau badan hukum yang merancang dan merencanakan pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil;
- e. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data seksi pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;

- f. Melaksanakan tata usaha penyerahan rumah bagi masyarakat terdampak program permukiman kumuh;
- g. Melaksanakan registrasi orang atau badan hukum pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil;
- h. Melaksanakan pemrosesan dan penyiapan rekomendasi sertifikasi orang atau badan hukum pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil;
- i. Menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- j. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- k. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- l. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- m. Menilai kinerja bawahan;
- n. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- o. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. Menyusun bahan kebijakan, strategi, dan perencanaan pengembangan prasarana dan sarana air bersih;
- q. Melaksanakan fasilitasi penyiapan program pembangunan serta fasilitasi perencanaan dan pemberian izin pembangunan prasarana dan sarana air bersih;
- r. Menyusun bahan petunjuk teknis perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan serta melaksanakan pembangunan fisik prasarana dan sarana air bersih;
- s. Menyusun bahan petunjuk pengawasan, pengendalian, pemberian bantuan teknis, dan pembinaan manfaat prasarana dan sarana air bersih, serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan kriteria;

- t. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis pengembangan sanitasi, fasilitasi pembinaan teknis dan manajemen terhadap penyelenggara penyediaan air bersih, serta fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan prasarana dan sarana air bersih;
- u. Menyusun bahan evaluasi kinerja pelayanan penyelenggara air bersih ; dan
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman mempunyai tugas :

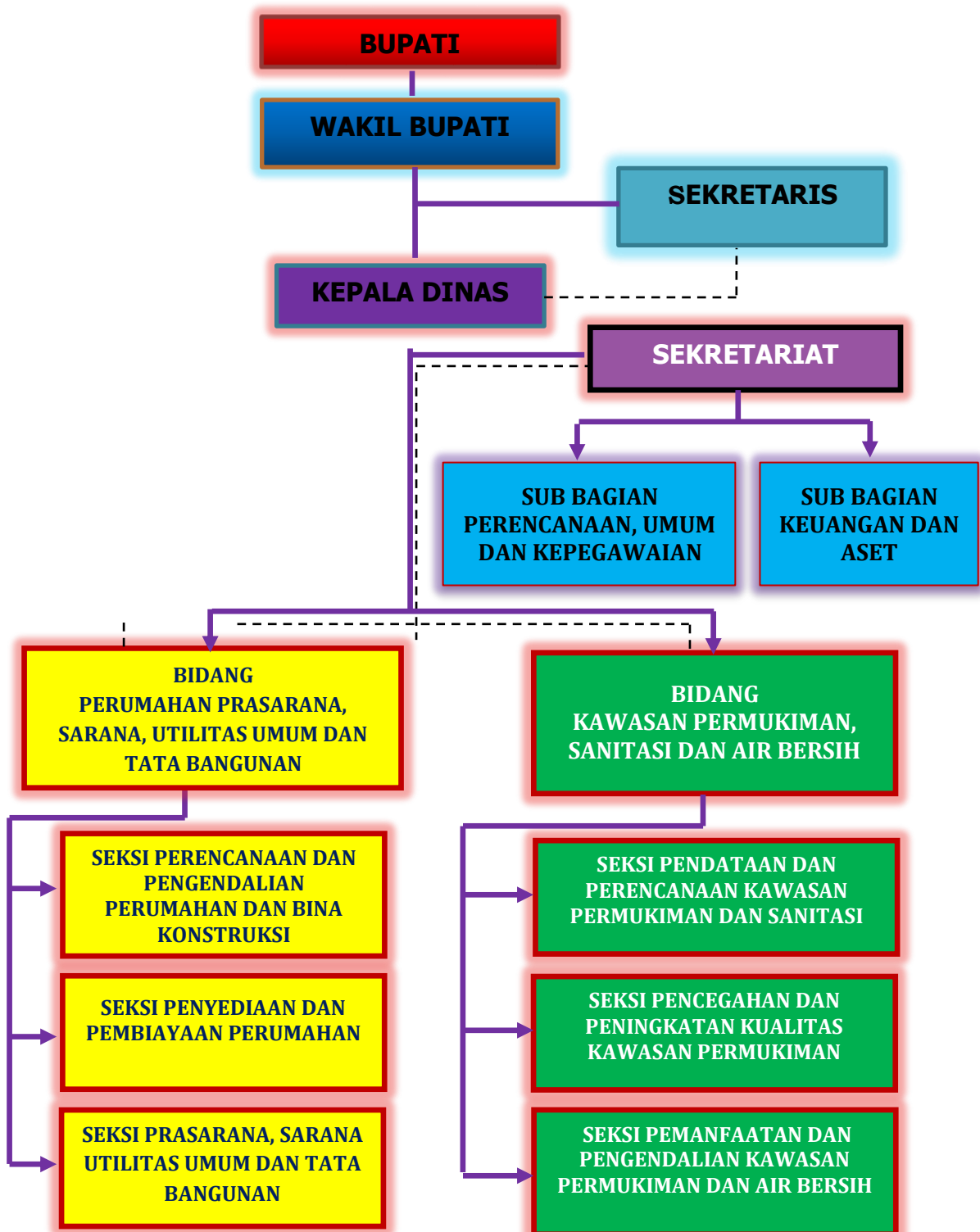
- a. Melaksanakan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
- b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
- c. Melaksanakan kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU;
- d. Melaksanakan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh;
- e. Melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- f. Melaksanakan kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- g. Melaksanakan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan

permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;

- h. Menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- i. Melaksanakan survey tentang system drainase perkotaan, serta menyusun rencana dan gambar;
- j. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang perbaikan rumah tidak layak huni, pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh luas di bawah 10 (sepuluh) Ha, pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh, dan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh;
- k. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data seksi pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
- l. Melaksanakan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni;
- m. Melaksanakan kebijakan pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- n. Melaksanakan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
- o. Memberi bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh;
- p. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
- q. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
- r. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;

- s. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- t. Menilai kinerja bawahan;
- u. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- v. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih sesuai dengan bidang tugasnya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Sumber : Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020

C Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Ketersediaan kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung;
2. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kawasan Perdesaan
3. Kurangnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan serta sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman.
4. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
5. Pengelolaan air limbah/sanitasi dari akses aman menjadi akses layak.
6. Kualitas dan cakupan layanan air bersih/air minum belum memadai.
7. Luasan kawasan perkotaan dan kawasan infrastruktur perdesaan (kawasan minapolitan, rupanandur, kampung batik dan bagi rasa).
8. Penyerahan PSU Perumahan oleh pihak pengembang perumahan ke pihak Pemkab.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2021 mendukung pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode 2018-2023, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2021 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik yang mudah, cepat serta penuh kepastian (dari sisi waktu pelayanan dan biaya);
2. Belum terukurnya tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kepada masyarakat;
3. Terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, saluran sanitasi dan air bersih terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah dalam mendapatkan fasilitas perumahan yang layak huni, saluran sanitasi dan air bersih.
5. Keterbatasan lahan penyediaan sarana sanitasi dan keterbatasan sumber air bersih.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
7. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;

E Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi gambaran umum, tugas dan fungsi, kepegawaian, sarana dan prasarana, keuangan, isu strategis yang dihadapi SKPD, Landasan Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Rencana Kinerja Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Aksi Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan adalah dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 . Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Pamekasan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Pamekasan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Pamekasan sebagai Kabupaten yang RAJJHA, BAJJHRA tor PARJUGHA.

Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah:

**" Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata Dan Berkelanjutan
Berdasarkan Nilai-Nilai Agama"**

Terdapat beberapa pokok-pokok visi antara lain:

- *Pamekasan Rajjha*, artinya merupakan gambaran tata kelola kota yang didasarkan pada karakter lokal, rapi, asri, memiliki nilai estitika tinggi, serta memiliki perspektif ekonomis dan sustainability. Pamekasan.
- *Pamekasan Bajjhra*, artinya konsep keberuntungan dalam bahasa Madura. Tujuan akhir dari pembangunan jangka menengah Pamekasan, dimaksudkan untuk memberikan keberuntungan bagi masyarakat

Pamekasan, khususnya keberuntungan secara ekonomis.

- *Pamekasan Parjhuga*, artinya merupakan konsep dalam bahasa Madura yang menggambarkan seorang individu yang memiliki kecakapan, baik kecakapan fisik, psikologis, estetis, maupun teologis.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri Manufaktur Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya.
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
4. Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Berkualitas dan Merata.
5. Pengelolaan Potensi Sosial, Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendukung pada Misi ke -4, yaitu : Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Berkualitas dan Merata.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mendukung kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat

dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 sebanyak 1 tujuan yaitu meningkatkan pemenuhan dan kualitas infrastruktur dasar perumahan dan permukiman, dan 2 sasaran strategis, yaitu meningkatnya kualitas bangunan gedung sesuai standart, dan meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pamekasan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman.	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	- Persentase pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan pemukiman	59,31 %	59,52 %	59,73 %	59,95 %	60,09 %
			- Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	33,33 %	56,72 %	67,83 %	78,94 %	90,06 %
			- Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	5 %	10 %	20 %	60 %	80 %
		Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	- Cakupan ketersediaan rumah layak huni	95,33 %	97,17 %	97,37 %	97,57 %	97,77 %
			- Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	97,48 %	84,03 %	63,03 %	42 %	21 %
			- Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	53,53 %	54,53 %	55,53 %	56,53 %	57,53 %
			- Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	63,65 %	64,65 %	65,65 %	66,65 %	67,65 %

Sumber : Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode 2018-2023

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M,PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	%	Pemukiman layak huni yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan yang sehat dan aman yang didukung (PSU) dengan penataan sesuai standar dan tata ruang yang berlaku serta menjamin kesehatan masyarakat	(Luas permukiman layak huni / Luas wilayah permukiman) X 100%	DPRKP
2	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung	%	Penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung	(Jumlah bangunan gedung yang ber - IMB / Jumlah seluruh bangunan gedung) X 100 %	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
		Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas/ Laik Fungsi	%	suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif (status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan IMB) dan persyaratan teknis	(Jumlah Gedung Penyelenggaraan Pemerintah yang Layak Fungsi / Jumlah Gedung Penyelenggaraan Pemerintah) X 100%	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/Prt/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				(persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung) sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.		
3	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya	(Jumlah rumah layak huni / Jumlah seluruh layak huni) X 100%	Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	%	Perbandingan jumlah luasan permukiman kumuh yang menurun apabila dibandingkan dengan jumlah luasan daerah Kabupaten Pamekasan yang dinyatakan dalam persen (%)	(Luas Lingkungan Permukiman Kumuh/ Luas Wilayah) X 100%	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase	(Jumlah rumah tangga dengan air minum layak / Jumlah seluruh rumah tangga) X 100 %	DPRKP

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	%	Perbandingan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi layak (dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase	$\left(\frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan layanan sanitasi layak}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \right) \times 100 \%$	DPRKP
4	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Poin	Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.	Penilaian SAKIP 2020 : Perencanaan Kinerja 25% Pengukuran Kinerja 25% Pelaporan Kinerja 10% Evaluasi Kinerja 20% Capaian Kinerja 20%	Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Sosial.

B. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan, Rencana Kinerja Tahun 2021 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2021, Berikut Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2021
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pamekasan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman,		Rasio Permukiman Layak Huni	%	59,73
		Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	%	67,83
			Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	%	20
		Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	97,37
			Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	%	63,03
			Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	55,53
			Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	%	65,65

Sumber : Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2021

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 mendukung pada dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Pada tanggal 27 Februari Tahun 2021 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Awal)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pamekasan

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Persentase pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan pemukiman	59,73%
2.	Meningkatnya Kualitas perumahan dan bangunan gedung sesuai standar	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	97,37%
		Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung	1,26%
		Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas / Laik Fungsi	26%
3.	Meningkatnya Penyehatan lingkungan permukiman	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	63,03%
		Prosentase Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	55,53%
		Prosentase Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	65,65%
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP OPD	A

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum	34,204,475,200	APBD + APBN
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	17,637,779,000	APBD + APBN

3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	14,439,999,575	APBD
4.	Program Pengembangan Permukiman	54,277,999,408	APBD
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	7,444,172,338	APBD
6.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	21,099,999,680	APBD
7.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	250,000,000	APBD
8.	Program Kawasan Permukiman	4,979,134,872	APBD + APBN
9.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	8,950,000,000	APBD
JUMLAH		163.283.560.073	APBD + APBN

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan (Awal) Tahun 2021
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
A	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	80%	34,204,475,200
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan	7 SPAM	34,204,475,200
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, Strategi dan teknis SPAM yang disusun	2 dokumen	199,999,776

2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang dibangun di kawasan perdesaan	203 unit	26,524,999,929
3	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah SPAM di kawasan perdesaan yang ditingkatkan kualitasnya	8 Desa	3,442,752,927
4	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan yang diperbaiki	3 unit	299,999,897
5	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	jumlah penerima SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat yang dibina dan diawasi	38 KKM	1,494,999,900
6	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Jumlah pelaksanaan kerjasama SPAM yang dibina dan diawasi	1 unit	150,000,000
7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang diperluas di kawasan perdesaan	9 Desa	2,091,722,771
B	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangkan	65,65%	17,637,779,000
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan	1 SPAL D	17,637,779,000
8	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala yang direhabilitasi/ ditingkatkan	31 Desa	17,637,779,000
C	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase yang Dikelola dan Dikembangkan	49,25%	14,439,999,575
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan	2 Sistem Drainase	14,439,999,575
9	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah sisten drainase lingkungan yang dibangun	43 unit	5,539,999,615
10	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	jumlah saluran drainase lingkungan yang direhabilitasi	42 unit	8,899,999,960
D	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman yang Dikembangkan	60%	54,277,999,408
4	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis yang diselenggarakan	1 Infrastruktur	54,277,999,408

11	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dibangun dan dikembangkan	334 unit	54,277,999,408
E	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang tertata	26%	7,444,172,338
5	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan	4 Koordinasi	7,444,172,338
12	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penerbitan IMB, SLF peran TABG, Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG yang diselenggarakan	200 Unit	200,000,000
13	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang disusun	4 Dokumen	7,244,172,338
		jumlah sarana dan prasarana pendukung bangunan gedung kantor	5 fasum	
		jumlah gedung kantor /instansi pemerintah daerah yang dibangun diawasi dan dimanfaatkan	1 Gedung Kantor	
F	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	38,5%	21,099,999,680
6	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan	2 Penataan Bangunan	21,099,999,680
14	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana sistem penataan kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan yang disusun	1 Dokumen	299,999,980
15	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata	147 Unit	20,799,999,700
G	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil yang Bersertifikat di Bidang Jasa Konstruksi	24%	250,000,000
7	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan	2 Penyelenggaraan	200,000,000

16	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang dilaksanakan	100 Orang	150,000,000
17	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil yang bersertifikat	100 Orang	50,000,000
8	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan	1 IUJK	50,000,000
18	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah penerbitan rekomendasi teknis IUJK nasional yang difasilitasi	100 Badan Usaha	50,000,000
H	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	106,647,500
9	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	6 Perencanaan	106,647,500
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 Dokumen	50,000,000
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang dilaksanakan	1 Dokumen Data	
20	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	40 Dokumen	5,247,500
21	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	20 dokumen	4,800,000
22	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan	40 dokumen	4,800,000
23	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD yang dilaksanakan	20 dokumen	4,800,000
24	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	3 dokumen	37,000,000
H	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	2,574,764,130
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 Unit Kerja	2,574,764,130

25	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	14 Bulan	2,574,764,130
H	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	80%	217,714,800
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	53 Aparatur	217,714,800
26	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	53 Pakaian Dinas	68,734,800
27	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	53 Aparatur	148,980,000
H	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Sarana Prasarana yang terpenuhi	100%	1,281,120,609
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	6 Sarana	310,829,169
28	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 komponen	5,760,000
29	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	50 Peralatan Kantor	34,442,169
		Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia	20 Alat Kebersihan	
30	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 bulan	39,700,000
31	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 Barang	37,787,000
32	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	80 Kali	226,140,000
13	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	1 Prasarana	260,773,600
33	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	66 unit	260,773,600
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	3 Jasa Penunjang	506,632,440
34	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	2 Jasa Layanan	4,125,000
35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik yang disediakan	6 Jasa Layanan	76,357,440

36	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	11 Jasa Layanan	393,150,000
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	3 Pemeliharaan	202,885,400
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5 Kendaraan	119,995,400
38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dikelola	148 unit	28,820,000
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	1 Gedung Kantor	54,070,000
		Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara / direhabilitasi	1 Rumah Dinas	
I	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	89%	4,979,134,872
16	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya	1 Kawasan	349,999,900
40	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun	3 Dokumen	349,999,900
17	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya	3 Kawasan	4,629,134,972
41	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	61 Orang	1,275,260,000
42	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU yang dikerjasamakan	244.75 Ha	2,349,999,972
43	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan	5 unit	1,003,875,000
J	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase Rumah Layak Huni dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	14 unit	8,950,000,000

18	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan	5 Koordinasi	8,950,000,000
44	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	500 Orang	8,750,000,000
45	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	jumlah perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha yang dikerjasamakan	20 Orang	200,000,000
JUMLAH				167,463,807,112

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 29 Oktober tahun 2021 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dikarenakan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	59,73%
2.	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standar	Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung	67,83%
		Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas / Laik Fungsi	20%
3.	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	97,37%
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	63,03%
		Prosentase Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	55,53%
		Prosentase Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	65,65%
4.	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum	Rp 44.604.474.061	APBD + APBN
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 17.537.779.000	APBD + APBN
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 4.924.999.999	APBD

4.	Program Pengembangan Permukiman	Rp 84.514.474.480	APBD
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 200.000.000	APBD
6.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp 31.549.439.350	APBD
7.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 250.000.000	APBD
8.	Program Kawasan Permukiman	Rp 2.838.234.650	APBD + APBN
9.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 12.635.000.000	APBD
10.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 55.900.000	APBD
JUMLAH		Rp203.610.761.472	APBD + APBN

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :

Tabel 2.7

**Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
A	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	80%	44,604,474,061
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan	7 SPAM	44,604,474,061
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, Strategi dan teknis SPAM yang disusun	2 dokumen	199,999,726
2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang dibangun di kawasan perdesaan	311 Dusun	37,024,999,851

3	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah SPAM di kawasan perdesaan yang ditingkatkan kualitasnya	1 Desa	2,642,750,874
4	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan yang diperbaiki	10 Desa	1,100,000,939
5	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	jumlah penerima SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat yang dibina dan diawasi	5 KKM	1,494,999,900
6	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Jumlah pelaksanaan kerjasama SPAM yang dibina dan diawasi	1 unit	50,000,000
7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang diperluas di kawasan perdesaan	10 Desa	2,091,722,771
B	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangkan	65,65%	17,537,779,000
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan	2 SPAL	17,537,779,000
8	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala yang direhabilitasi/ditingkatkan	19 Desa	3,136,650,000
9	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sistem pengelolaan air limbah terpusat yang dibangun	30 Desa	14,401,129,000
C	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase yang Dikelola dan Dikembangkan	49,25%	4,924,999,999
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan	1 Sistem Drainase	4,924,999,999
10	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	jumlah saluran drainase lingkungan yg direhabilitasi	35 Desa	4,924,999,999
D	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman yang Dikembangkan	60%	84,514,474,480
4	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis yang diselenggarakan	1 Infrastruktur	84,514,474,480
11	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dibangun dan dikembangkan	475 Unit	84,514,474,480

E	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang tertata	26%	4,700,459,932
5	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan	2 Penyelenggaraan	4,700,459,932
12	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penerbitan IMB, SLF peran TABG, Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG yang diselenggarakan	200 Unit	200,000,000
13	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang disusun	2 Dokumen	4,500,459,932
		jumlah sarana dan prasarana pendukung bangunan gedung kantor	12 Sarpras	
		jumlah gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang dibangun diawasi dan dimanfaatkan	1 Gedung Kantor	
F	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	38,5%	31,549,439,350
6	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan	1 Penataan Bangunan	31,549,439,350
14	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata	200 Unit	31,549,439,350
G	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil yang Bersertifikat di Bidang Jasa Konstruksi	24%	250,000,000
7	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan	2 Penyelenggaraan	200,000,000
15	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang dilaksanakan	100 Orang	150,000,000
16	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil yang bersertifikat	100 Orang	50,000,000
8	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan	1 IUJK	50,000,000
17	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah penerbitan rekomendasi teknis IUJK nasional yang difasilitasi	100 Badan Usaha	50,000,000

H	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	97,144,000
9	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	4 Perencanaan	97,144,000
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 Dokumen	50,000,000
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang dilaksanakan	1 Dokumen Data	
19	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	39 Dokumen	5,247,500
20	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan	18 dokumen	4,800,000
21	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	3 dokumen	37,096,500
H	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	1,859,061,952
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 Unit Kerja	1,859,061,952
22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	14 Bulan	1,859,061,952
H	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	80%	148,980,000
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	53 Aparatur	148,980,000
23	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	53 Aparatur	148,980,000
H	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana Prasarana yang terpenuhi	100%	1,322,206,626
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	6 Sarana	268,060,850

24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 komponen	5,760,000
25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	55 Peralatan Kantor	34,442,100
		Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia	17 Alat Kebersihan	
26	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 bulan	45,340,000
27	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 Barang	37,868,750
28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	80 Kali	144,650,000
13	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	1 Prasarana	325,269,700
29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	98 unit	325,269,700
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	3 Jasa Penunjang	517,727,640
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	2 Jasa Layanan	4,125,000
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik yang disediakan	6 Jasa Layanan	76,352,640
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	11 Jasa Layanan	437,250,000
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	3 Pemeliharaan	211,148,436
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5 Kendaraan	128,263,436
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dikelola	147 unit	28,815,000
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	1 Gedung Kantor	54,070,000
		Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara / direhabilitasi	1 Rumah Dinas	
I	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	89%	2,838,234,650

16	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya	1 Kawasan	349,999,900
36	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun	3 Dokumen	349,999,900
17	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya	2 Peningkatan Kualitas	2,488,234,750
37	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	61 Unit	1,275,260,000
38	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan	3 Koordinasi	1,212,974,750
J	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase Rumah Layak Huni dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	95,80%	12,635,000,000
18	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan	1 Perbaikan RTLH	12,635,000,000
39	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	722 Unit	12,635,000,000
K	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang ditingkatkan	33,33%	55,900,000
19	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	11,11%	55,900,000
40	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang dilakukan	1 PSU	55,900,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan,

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah,

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas

indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran,

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut,

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan,

Dalam laporan ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan, Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan, Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi, Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

No,	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas		Rasio Permukiman Layak Huni	59.73%	57.05%	95.52%	Cukup	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman,	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	67.83%	67.83%	100%	Baik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	20%	11.86%	59.30%	Kurang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3		Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,37%	96.35%	98.95%	Cukup	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	63.03%	62.10%	98.53%	Cukup	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	55,53%	53%	94.63%	Cukup	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	65,65%	62.52%	95.23%	Cukup	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4		Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	85.00	83.69	98.46%	Memuaskan	Inspektorat

Analisa capaian kinerja pada tabel diatas ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atas indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan. Pengukuran tingkat capaian kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga target kinerja sasaran yang belum tercapai di tahun 2021 ini,

Salah satu contoh keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran yaitu pada indikator prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung dimana capaian kinerjanya 100% sehingga masuk dalam kategori 'Baik'. Hal ini disebabkan karena antusias pemohon untuk mengurus PBG dan SLF yang tinggi. Begitu juga dengan indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni dimana pada tahun 2021 telah ditargetkan sebanyak 883 Unit yang akan dikerjakan, namun pada realisasinya terselesaikan sebanyak 848 unit rumah sehingga kategori capaian yang dihasilkan 'Cukup' yaitu sebesar 98,95%. Keberhasilan capaian kinerja ini tentunya didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, perencanaan yang komprehensif dan juga dukungan anggaran belanja baik fisik maupun operasionalnya.

Sebaliknya pada indikator sasaran pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi pencapaian target kinerjanya masuk dalam kategori 'Kurang' yakni 59.30%, hal ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran di awal tahun membuat kegiatan pembangunan gedung kantor untuk Kecamatan Proppo tidak bisa terlaksana pada tahun 2021. Selain itu adanya pandemic covid-19 menyebabkan pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi dibatasi jumlah pesertanya, dari target 100 orang yang terealisasi hanya sekitar 30 orang.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2020 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No,	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas		Rasio Permukiman Layak Huni	59,52%	57,54%	96,68%	59.73%	57.05%	95.52%
2	Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman,	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	1,15%	1,10%	95,65%	67.83%	67.83%	100%
			Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	24%	7,20%	30%	20%	11.86%	59.30%
3		Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,17%	95,61%	98,39%	97,37%	96.35%	98.95%
			Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	84,03%	81,53%	97,02%	63.03%	62.10%	98.53%
			Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	54,53%	51,73%	94,87%	55,53%	53%	94.63%
			Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	64,65%	61,60%	95,28%	65,65%	62.52%	95.23%
4		Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	85.00	82.86	97.48%	85.00	83.69	98.46%

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan pada tabel perbandingan capaian kinerja diatas dapat kita lihat bahwa capaian kinerja sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan pada Tahun Anggaran 2021 rata-rata meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Hasil capaian kinerja sasaran yang diperoleh dapat dilihat dari perbandingan indikato-indikator sasaran yang diharapkan dengan realisasinya atau membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai,

1. Sasaran I : Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart**Indikator**

- Pada indikator prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung, capaian kinerjanya di tahun 2021 masuk dalam kategori 'Baik' dimana capaian kinerjanya 100%. Hal ini disebabkan karena antusias pemohon untuk mengurus PBG dan SLF tinggi. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah bangunan yang ber-IMB dengan jumlah bangunan di Kabupaten Pamekasan, sehingga perbandingan capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2020 = 95,65%, dan pada tahun 2021 = 100%.
- Pada indikator prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi, capaian kinerjanya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun kategori capaiannya masih 'Kurang', karena ada kegiatan pembangunan gedung kantor Kecamatan Propopo yang tidak bisa terlaksana karena adanya refocusing anggaran. Selain itu pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi hanya terserap sedikit untuk pesertanya.

2. Sasaran II : Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Sehat**Indikator**

- Pada tahun 2021 ini target jumlah rumah yang diperbaiki menjadi rumah layak huni sebanyak 848 unit rumah, sehingga jumlah rumah layak huninya di Kabupaten Pamekasan meningkat. Hal ini menyebabkan capaian kinerja sasaran dengan indikator cakupan ketersediaan rumah

layak huni semakin meningkat tiap tahunnya, yakni 98,39% pada Tahun 2020 dan 98,95% di Tahun 2021.

- Pada indikator penurunan luasan kawasan kumuh, pencapaian kinerja tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami peningkatan. Dengan capaian kinerja yang semakin meningkat berarti menunjukkan luasan kawasan kumuh di Kabupaten Pamekasan semakin berkurang tiap tahunnya sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan semakin menurunnya luasan kawasan kumuh maka kawasan permukiman kumuh Kabupaten Pamekasan dapat dicegah kekumuhannya sekaligus meningkatkan kualitas sarana prasarana di kawasan tersebut.
- Pada indikator proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan, pencapaian target kinerjanya termasuk kategori sangat baik dengan capaian 94,63% pada tahun 2021. Meskipun perbandingan pada tahun sebelumnya lebih besar sedikit capaiannya, hal ini tidak mempengaruhi kategori pencapaian kinerja pada sasaran ini.
- Pada indikator proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan, capaian kinerja pada tahun 2021 dengan tahun 2020 cenderung hampir sama yaitu dengan kategori capaian 95.28% di tahun 2020 dan 95.23% di tahun 2021.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan periode 2018 -2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman.	Rasio Permukiman Layak Huni	57.05%	60.09%	94.94%
2	Meningkatnya kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	67.83%	90.06%	75,32%
		Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	11.86%	80%	14.83%
3	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	96.35%	97.77%	98.55%
		Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	62.10%	21%	81.20%
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	53%	57.53%	92.13%
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	62.52%	67.65%	92.42%
4	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83.69	91	91.97%

Tabel diatas menyajikan tingkat kemajuan capaian sasaran strategis realisasi kinerja tahun 2021 terhadap target akhir periode renstra 2023. Secara umum tingkat kemajuan dari masing-masing indikator kinerja sasaran sudah sangat baik namun masih ada satu indikator yang masih membutuhkan upaya untuk pencapaian yang lebih baik lagi. Tidak terlaksananya sebagian kegiatan pada indikator sasaran pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi menyebabkan tingkat kemajuan sasaran strategisnya rendah. Adapun faktor penghambatnya yaitu adanya refocusing anggaran terkait penanganan COVID 19 dan pengesahan DPA PAK yang mepet. Selain

itu pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi tidak terlaksana maksimal karena masih adanya PPKM sehingga jumlah peserta yang terserap hanya sedikit, yaitu sekitar 30 orang.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2021	STANDAR NASIONAL	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman.	Rasio Permukiman Layak Huni	57.05%	-	-
2	Meningkatnya kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	67.83%	-	-
		Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	11.86%	-	-
3	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	96.35%	-	-
		Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	62.10%	-	-
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	53%	100%	53%
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	62.52%	90%	69.47%
4	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83.69	-	-

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman,	Rasio Permukiman Layak Huni	59.73%	57.05%	95.52%	-	-
2	Meningkatnya kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	67.83%	67.83%	100%	-	-
		Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	20%	11.86%	59.30%	• Refokusing anggaran sehingga ada 1 bangunan di Kecamatan Proppo tidak bisa dilaksanakan. • Pengesahan DPA PAK yang mepet tanggal 29 Oktober 2021, menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan tambahan di PAK (untuk proses lelangnya saja membutuhkan waktu paling cepat 1,5 bulan, dan pelaksanaanya membutuhkan waktu 3 bulan)	Pengesahan PAK agar dipercepat, usahakan di pertengahan tahun sudah di sahkan

						Dikarenakan adanya pandemic Covid-19 sehingga jumlah peserta dibatasi dalam setiap pelaksanaannya	Kedepan akan memberikan penekanan kepada pelaku usaha Jasa Konstruksi, untuk mengikutsertakan pekerjaannya dalam Pelatihan Tenaga Jasa Konstruksi, Mengingat pentingnya Pekerja memiliki Sertifikat Tenaga Terampil Jasa Konstruksi bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi.
						Dihapusnya penerbitan SIUJK Nasional sejak diterbitkannya UU Cipta Kerja.	
						Untuk dilakukan pelatihan secara online, juga tidak memungkinkan karena keterbatasan SDM dalam mengoperasikan computer (peserta pelatihan jasa konstruksi adalah tukang)	
3	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,37%	96.35%	98.95%	-	-
		Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	63.03%	62.10%	98.53%	-	-
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	55,53%	53%	94.63%	-	-
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	65,65%	62.52%	95.23%	-	-
4	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	85.00	83.69	98.46%	-	-

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
1	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	95.52%				
2	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung	100%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang tertata	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan	100.00%	Menunjang
				Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penerbitan IMB, SLF peran TABG, Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG yang diselenggarakan	100.00%	Menunjang

				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang ditingkatkan	100.00%	Menunjang
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100.00%	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah PSU perumahan yang diserahkan oleh pihak pengembang kepada Pemkab	100.00%	Menunjang
		Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas / Laik Fungsi	59.30%	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan	100.00%	Menunjang
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang disusun	78.57%	Menunjang
					jumlah sarana dan prasarana pendukung bangunan gedung kantor		

					jumlah gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang dibangun diawasi dan dimanfaatkan		
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	90.01%	Menunjang
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan	100.00%	Menunjang
				Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata	90.50%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil yang Bersertifikat di Bidang Jasa Konstruksi	37.67%	Menunjang
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan	100.00%	Menunjang
				Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang dilaksanakan	26.00%	Menunjang
				Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil yang bersertifikat	26.00%	Menunjang

				Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan	100.00%	Menunjang
				Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah penerbitan rekomendasi teknis IUJK nasional yang difasilitasi	61.00%	Menunjang
3	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Sehat	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	98.53%	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman yang Dikembangkan	98.53%	Menunjang
				Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis yang diselenggarakan	100.00%	Menunjang
				Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dibangun dan dikembangkan	98.53%	Menunjang
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	100.00%	Menunjang
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya	100.00%	Menunjang

				Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun	100.00%	Menunjang
		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	98.95%	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	100.00%	Menunjang
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya	100.00%	Menunjang
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	100.00%	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan	100.00%	Menunjang
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase Rumah Layak Huni dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	93.84%	Menunjang

				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan	100.00%	Menunjang
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	99.31 %	Menunjang
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan	94.63%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	94.63%	Menunjang
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan	100.00%	Menunjang
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, Strategi dan teknis SPAM yang disusun	100.00%	Menunjang
				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang dibangun di kawasan perdesaan	94.53%	Menunjang

				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah SPAM di kawasan perdesaan yang ditingkatkan kualitasnya	100.00%	Menunjang
				Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan yang diperbaiki	90.00%	Menunjang
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	jumlah penerima SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat yang dibina dan diawasi	80.00%	Menunjang
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Jumlah pelaksanaan kerjasama SPAM yang dibina dan diawasi	100.00%	Menunjang
				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang diperluas di kawasan perdesaan	100.00%	Menunjang
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan	95.23%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangkan	95.92%	Menunjang
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan	100.00%	Menunjang

				Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala yang direhabilitasi/ditingkatkan	89.47%	Menunjang
				Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sistem pengelolaan air limbah terpusat yang dibangun	100.00%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase yang Dikelola dan Dikembangkan	94.29%	Menunjang
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan	100.00%	Menunjang
				Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	jumlah saluran drainase lingkungan yang direhabilitasi	94.29%	Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2021 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Pamekasan menunjang semuanya,

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% Capaian
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	Rp44,604,474,061	Rp39,918,519,501	89.49%
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota	Rp44,604,474,061	Rp39,918,519,501	89.49%
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Rp199,999,726	Rp191,854,600	95.93%
2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp37,024,999,851	Rp33,528,792,078	90.56%
3	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp2,642,750,874	Rp1,783,060,756	67.47%
4	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp1,100,000,939	Rp1,061,758,700	96.52%
5	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Rp1,494,999,900	Rp1,333,894,000	89.22%
6	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Rp50,000,000	Rp37,690,000	75.38%
7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp2,091,722,771	Rp1,981,469,367	94.73%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp17,537,779,000	Rp17,330,507,098	98.82%
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp17,537,779,000	Rp17,330,507,098	98.82%
8	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rp3,136,650,000	Rp2,929,904,700	93.41%

9	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rp14,401,129,000	Rp14,400,602,398	100.00%
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp4,924,999,999	Rp4,601,419,500	93.43%
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp4,924,999,999	Rp4,601,419,500	93.43%
10	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Rp4,924,999,999	Rp4,601,419,500	93.43%
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rp84,514,474,480	Rp71,258,507,270	84.32%
4	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp84,514,474,480	Rp71,258,507,270	84.32%
11	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp84,514,474,480	Rp71,258,507,270	84.32%
5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp2,838,234,650	Rp2,438,615,900	85.92%
5	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Rp349,999,900	Rp331,580,700	94.74%
12	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Rp349,999,900	Rp331,580,700	94.74%
6	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Rp2,488,234,750	Rp2,107,035,200	84.68%
13	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp1,275,260,000	Rp1,273,022,000	99.82%
14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Rp1,212,974,750	Rp834,013,200	68.76%
6	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp12,635,000,000	Rp12,547,500,000	99.31%
7	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Rp12,635,000,000	Rp12,547,500,000	99.31%
15	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Rp12,635,000,000	Rp12,547,500,000	99.31%
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp4,700,459,932	Rp4,047,481,806	86.11%

8	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp4,700,459,932	Rp4,047,481,806	86.11%
16	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rp200,000,000	Rp104,287,356	52.14%
17	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rp4,500,459,932	Rp3,943,194,450	87.62%
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp31,549,439,350	Rp27,770,632,500	88.02%
9	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp31,549,439,350	Rp27,770,632,500	88.02%
18	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Rp31,549,439,350	Rp27,770,632,500	88.02%
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp250,000,000	Rp63,655,950	25.46%
10	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp200,000,000	Rp40,193,350	20.10%
19	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp150,000,000	Rp36,393,350	24.26%
20	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Rp50,000,000	Rp3,800,000	7.60%
11	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Rp50,000,000	Rp23,462,600	46.93%
21	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Rp50,000,000	Rp23,462,600	46.93%
10	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp55,900,000	Rp10,875,000	19.45%
12	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp55,900,000	Rp10,875,000	19.45%
22	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Rp55,900,000	Rp10,875,000	19.45%

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	59.73%	57.05%	95.52%	Rp207,038,154,050	Rp182,938,402,598	88.36%	7.16
2	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung	67.83%	67.83%	100%	Rp255,900,000	Rp115,162,356	45.00%	55
		Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas / Laik Fungsi	20%	11.86%	59.30%	Rp36,299,899,282	Rp31,777,482,900	87.54%	-28.24
3	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	97,37%	96.35%	98.95%	Rp15,123,234,750	Rp14,654,535,200	96.90%	1.69
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	63.03%	62.10%	98.53%	Rp84,864,474,380	Rp71,590,087,970	84.36%	14.17

		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan	55,53%	53%	94.63%	Rp44,604,474,061	Rp39,918,519,501	89.49%	5.14
3		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan	65,65%	62.52%	95.23%	Rp22,462,778,999	Rp21,931,926,598	97.64%	-2.41
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP OPD	85.00	83.69	98.46%	Rp3,427,392,578	Rp2,950,688,073	86.09%	12.37

Uraian penjelasan tabel :

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

Pada tabel diatas, pencapaian kinerja dan anggaran pada tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bisa dikategorikan cukup bagus dengan nilai capaian 95.52% pada Kinerjanya dan 88.36% pada anggarannya. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi kinerja yang tinggi karena capaian kinerjanya lebih besar daripada anggarannya. Ada beberapa indikator sasaran yang tingkat efisiensinya masih dikategorikan kurang seperti misalnya pada indikator sasaran prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas / laik fungsi dengan tingkat efisiensi -28.24%, dan Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan dengan tingkat efisiensi sebesar -2.41%.

Dari tabel diatas dapat kita lihat juga pada indikator prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran yang tingkat efisiensinya tinggi yaitu sebesar 55%, dimana capaian kinerjanya 100% sedangkan capaian anggarannya 45%. Ada beberapa indikator sasaran lainnya yang kategori kinerjanya dinilai efektif yaitu pada cakupan ketersediaan rumah layak huni, persentase penurunan luasan kawasan kumuh, dan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan.

Tingkat efisiensi yang masih rendah akan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ke depannya untuk lebih mengoptimalkan kinerja di semua kegiatan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sehingga tercapai kinerja yang efektif dan efisien.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%CAPAIAN	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	80 %	76 %	94.63%	Rp44,604,474,061	Rp39,918,519,501	89.49%	5.14%
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota	7 SPAM	7 SPAM	100.00%	Rp44,604,474,061	Rp39,918,519,501	89.49%	10.51%
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	Rp199,999,726	Rp191,854,600	95.93%	4.07%
2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	311 Dusun	294 Dusun	94.53%	Rp37,024,999,851	Rp33,528,792,078	90.56%	3.97%
3	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1 Desa	1 Desa	100.00%	Rp2,642,750,874	Rp1,783,060,756	67.47%	32.53%
4	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	10 Desa	9 Desa	90.00%	Rp1,100,000,939	Rp1,061,758,700	96.52%	-6.52%
5	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	5 KKM	4 KKM	80.00%	Rp1,494,999,900	Rp1,333,894,000	89.22%	-9.22%
6	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	1 unit	1 unit	100.00%	Rp50,000,000	Rp37,690,000	75.38%	24.62%

7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	10 Desa	10 Desa	100.00%	Rp2,091,722,771	Rp1,981,469,367	94.73%	5.27%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	65.7 %	62.97 %	95.92%	Rp17,537,779,000	Rp17,330,507,098	98.82%	-2.90%
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 SPALD	2 SPALD	100.00%	Rp17,537,779,000	Rp17,330,507,098	98.82%	1.18%
8	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	19 Desa	17 Desa	89.47%	Rp3,136,650,000	Rp2,929,904,700	93.41%	-3.94%
9	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	30 Desa	30 Desa	100.00%	Rp14,401,129,000	Rp14,400,602,398	100.00%	0.00%
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	49.3 %	46.44 %	94.29%	Rp4,924,999,999	Rp4,601,419,500	93.43%	0.86%
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Sistem Drainase	1 Sistem Drainase	100.00%	Rp4,924,999,999	Rp4,601,419,500	93.43%	6.57%
10	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	35 Desa	33 Desa	94.29%	Rp4,924,999,999	Rp4,601,419,500	93.43%	0.86%
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	60 %	51.05 %	85.09%	Rp84,514,474,480	Rp71,258,507,270	84.32%	0.77%

4	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Infrastruktur	1 Infrastruktur	100.00%	Rp84,514,474,480	Rp71,258,507,270	84.32%	15.68%
11	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	550 Unit	468 Unit	85.09%	Rp84,514,474,480	Rp71,258,507,270	84.32%	0.77%
5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	89 %	89 %	100.00%	Rp2,838,234,650	Rp2,438,615,900	85.92%	14.08%
5	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1 kawasan	1 kawasan	100.00%	Rp349,999,900	Rp331,580,700	94.74%	5.26%
12	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%	Rp349,999,900	Rp331,580,700	94.74%	5.26%
6	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2 Peningkatan Kualitas	2 Peningkatan Kualitas	100.00%	Rp2,488,234,750	Rp2,107,035,200	84.68%	15.32%
13	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	61 Unit	61 Unit	100.00%	Rp1,275,260,000	Rp1,273,022,000	99.82%	0.18%
14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	3 Koordinasi	3 Koordinasi	100.00%	Rp1,212,974,750	Rp834,013,200	68.76%	31.24%
6	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	95.8 %	89.9 %	93.84%	Rp12,635,000,000	Rp12,547,500,000	99.31%	-5.47%

7	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1 Perbaikan RTLH	1 Perbaikan RTLH	100.00%	Rp12,635,000,000	Rp12,547,500,000	99.31%	0.69%
15	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	722 Unit	717 Unit	99.31%	Rp12,635,000,000	Rp12,547,500,000	99.31%	0.00%
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	26 %	26 %	100%	Rp4,700,459,932	Rp4,047,481,806	86.11%	13.89%
8	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2 Penyelenggaraan	2 Penyelenggaraan	100.00%	Rp4,700,459,932	Rp4,047,481,806	86.11%	13.89%
16	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	200 Unit	200 Unit	100.00%	Rp200,000,000	Rp104,287,356	52.14%	47.86%
17	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	14 Unit	11 Unit	78.57%	Rp4,500,459,932	Rp3,943,194,450	87.62%	-9.05%

8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	38.5 %	34.65 %	90.01%	Rp31,549,439,350	Rp27,770,632,500	88.02%	1.99%
9	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1 Penataan Bangunan	1 Penataan Bangunan	100.00%	Rp31,549,439,350	Rp27,770,632,500	88.02%	11.98%
18	Penataan Bangunan dan Lingkungan	200 Unit	181 Unit	90.50%	Rp31,549,439,350	Rp27,770,632,500	88.02%	2.48%
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	24 %	9.04 %	37.67%	Rp250,000,000	Rp63,655,950	25.46%	12.21%
10	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	2 Penyelenggaraan	2 Penyelenggaraan	100.00%	Rp200,000,000	Rp40,193,350	20.10%	79.90%
19	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100 Orang	26 Orang	26.00%	Rp150,000,000	Rp36,393,350	24.26%	1.74%
20	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	100 Orang	26 Orang	26.00%	Rp50,000,000	Rp3,800,000	7.60%	18.40%
11	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	1 IUJK	1 IUJK	100.00%	Rp50,000,000	Rp23,462,600	46.93%	53.07%
21	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	100 Badan Usaha	61 Badan Usaha	61.00%	Rp50,000,000	Rp23,462,600	46.93%	14.07%
10	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	33.3 %	33.33 %	100.00%	Rp55,900,000	Rp10,875,000	19.45%	80.55%
12	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	11.1 %	11.11 %	100.00%	Rp55,900,000	Rp10,875,000	19.45%	80.55%
22	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 PSU	1 PSU	100.00%	Rp55,900,000	Rp10,875,000	19.45%	80.55%

Uraian penjelasan tabel :

Pada tabel diatas dapat dianalisa bahwa rata-rata perbandingan pencapaian kinerja kegiatan dan anggarannya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki tingkat efisiensinya yang cukup tinggi. Pada sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, capaian kinerjanya sama dengan capaian anggarannya sehingga menghasilkan tingkat efisiensi 0%. Hal ini menunjukkan kinerja yang ideal dimana capaian kinerjanya berbanding lurus dengan capaian pada anggarannya.

Selain itu masih ada beberapa sub kegiatan yang masih memiliki tingkat efisiensi yang tergolong rendah namun masih berada pada rate -1% s/d -10% dimana hal ini akan menjadi bahan evaluasi dan monitoring kami untuk diupayakan kembali secara maksimal di tahun berikutnya agar kinerja seluruh kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bisa berjalan efektif dan efisien.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2021. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 6 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman terdiri dari satu Indikator Kinerja yaitu Rasio Permukiman Layak Huni dengan capaian kinerja sebesar 95.52% (Kategori Cukup)
- Sasaran Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart terdiri dari dua indikator kinerja yaitu :
 - Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung, dengan capaian kinerja sebesar 99.48% (Kategori Cukup)
 - Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi, dengan capaian kinerja sebesar 59.30% (kategori Kurang Baik)

- Sasaran Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Sehat terdiri dari empat indikator kinerja yaitu :
 - Cakupan ketersediaan rumah layak huni, dengan capaian kinerja sebesar 98.95% (Kategori Cukup)
 - Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh, dengan capaian kinerja sebesar 98.53% (Kategori Cukup)
 - Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan, dengan capaian kinerja sebesar 94,63% (Kategori Cukup)
 - Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan, dengan capaian kinerja sebesar 95,26% (Kategori Cukup)
- Sasaran Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah terdiri dari indikator kinerja Nilai SAKIP, dengan capaian kinerja sebesar A (kategori Baik)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, maka secara umum pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja telah tercapai.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 207,038,154,050 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 182,938,402,598, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 serapan anggaran sebesar 88.36% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 7.16%,

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan ke depannya untuk mencapai tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

- Capaian kinerja tahun 2021 secara umumnya termasuk dalam kategori cukup baik sehingga diperlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung

oleh masyarakat

- Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.
- Kegiatan yang belum tercapai di tahun 2021 baik fisik maupun anggaran yang belum terserap semuanya akan diatasi dengan melakukan pengecekan dan mengidentifikasi permasalahannya serta menyusun anggarannya pada tahun berikutnya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 14 Februari 2022

KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN



MUHARRAM, ST
NIP. 19680330 199803 1 006
Pembina Utama Muda

LAMPIRAN

➤ MATRIKS RENSTRA 2018-2023 DAN PERUBAHANNYA

T u j u a n	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Pr ogram (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capai an pada Tahun Awal Perenc anaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SEBELUM PERUBAHAN																			
	Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan sumber daya unit kerja yang efektif dan efisien			Prosentase layanan kesekretariatan yg sesuai SOP		100%	Rp1,055,530,000	100%										DPRKP	Kab. Pamekasan
		1.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Terakomodir Dengan Baik	100%	100%	Rp476,530,000	100%	Rp616,337,021							100%	Rp1,092,867,021	DPRKP	Kab. Pamekasan
		1.04.01.01.01	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	60 Kali	60 Kali	Rp117,555,000	30 Kali	Rp77,562,021							90 Kali	Rp195,117,021		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.01.02	Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	6 Pelayanan	6 Pelayanan	Rp358,975,000	6 Pelayanan	Rp538,775,000							12 Pelayanan	Rp897,750,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.02	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas	● Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi		100%	Rp293,000,000	100%	Rp435,000,000							100%	Rp728,000,000	DPRKP	Kabupaten Pamekasan

			Kinerja Aparatur	• Prosentase Aparatur Yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya		87.50 %	Rp90,000,000	87.50 %	Rp125,000,000							87.50%	Rp215,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	6 Ruang	1 Rumdi n DPKP dan 9 Ruang di PEMD A Lama	Rp95,000,000	1 Rumdi n DPKP dan 9 Ruang di PEMD A Lama	Rp90,000,000							1 Rumdi n DPKP dan 9 Ruang di PEMD A Lama	Rp185,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.02.02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik	5 Unit	20 Unit X triwulan	Rp124,000,000	5 Unit	Rp120,000,000							5 Unit	Rp244,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.02.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	85 Unit	85 Unit	Rp24,500,000	225 Unit	Rp25,000,000							310 Unit	Rp49,500,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.02.05	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	31 Unit	8 Unit	Rp49,500,000	138 Unit	Rp200,000,000							146 Unit	Rp249,500,000		Kab. Pamekasan
		1.04.01.02.08	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang diadakan	-	-	Rp0	-	Rp0							-	Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.02.22	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	32 Orang	32 Orang	Rp90,000,000	33 Orang	Rp125,000,000							33 Orang	Rp215,000,000		Kabupaten Pamekasan

		1.04.01.03	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Prosentase Unit Kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja dengan kualitas baik	100%	100%	Rp196,000,000	100%	Rp57,000,000							100%	Rp253,000,000	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.03.01	Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun dengan kualitas baik	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp171,000,000	4 Dokumen	Rp27,000,000							4 Dokumen	Rp198,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.03.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dengan kualitas baik	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp25,000,000	1 Dokumen	Rp30,000,000							1 Dokumen	Rp55,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.03.03	Pengumpulan / Updating Data Kebutuhan Perencanaan	Jumlah dokumen laporan data kebutuhan perencanaan yang disusun		n/a	Rp0	n/a	Rp0								Rp0		Kabupaten Pamekasan
Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman				Persentase pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	59,11%	59,31%	Rp3,433,280,000	59,52%	Rp3,148,838,000							59,52%	Rp6,582,118,000	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
Kualitas perumahan dan bangunan gedung sesuai standar	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni				95,12%	95,33%	Rp659,280,000	97,17%	Rp597,978,000							97,17%	Rp1,257,258,000	DPRKP	Kab. Pamekasan
	Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung					1.05%	Rp264,000,000	1.15%	Rp200,000,000							1.15%	Rp464,000,000	DPRKP	Kab. Pamekasan
	Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas / Laik Fungsi					22.00%	Rp2,510,000,000	24%	Rp2,350,860,000							24%	Rp4,860,860,000	DPRKP	Kab. Pamekasan
		1.04.01.07	Program Pengembangan Perumahan	Prosentase Rumah Layak Huni	95,12%	95,33%	Rp659,280,000	95,57%	Rp698,466,000							95,57%	Rp1,357,746,000	DPRKP	Kab. Pamekasan

		1.04.01.07.01	Validasi Database Rumah Tidak Layak Huni Perdesaan	Jumlah Kecamatan yang mendapat validasi studi data base rumah tidak layak huni perdesaan	6 Kecamatan	2 Kecamatan	Rp250,000,000	n/a	Rp0							2 Kecamatan	Rp250,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.07.02	Koordinasi dan perencanaan peningkatan kualitas perumahan swadaya melalui DAK	Jumlah lokasi yang mendapatkan infrastruktur di Bidang Perumahan yang terkoordinasi		175 Unit	Rp140,593,000	130 Unit	Rp100,488,000							305 Unit	Rp241,081,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.07.03	Koordinasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Jumlah rumah yang ditingkatkan kualitasnya		416 Unit	Rp106,055,000	50 Unit	Rp30,000,000							466 Unit	Rp136,055,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.07.04	Pelaksanaan Kerjasama Program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) Lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah yang Dibangun		n/a	Rp0	n/a	Rp0							n/a	Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.07.05	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang di perbaiki		7 Unit	Rp120,000,000	n/a	Rp0							7 Unit	Rp120,000,000		Kab. Pamekasan
		1.04.01.07.06	Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah yang di perbaiki		n/a	Rp0	464 Unit	Rp446,878,000							464 Unit	Rp446,878,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.07.08	Penyediaan / Pengembangan Aplikasi Perumahan Berbasis IT	Jumlah Aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan		1 Aplikasi	Rp100,000,000	1 Aplikasi	Rp45,000,000							2 Aplikasi	Rp145,000,000		Kabupaten Pamekasan

		1.04. 01.0 7.09	Koordinasi dan Perencanaan Penunjang Rehabilitasi Rumah Swadaya	Jumlah lokasi yang mendapatkan Infrastruktur di Bidang Perumahan yang terkoordinasi	462 Unit	175 Unit	Rp83,225,000	130 Unit	Rp76,100,000							305 Unit	Rp159,325,000		Kabupaten Pamekasan
		Penyehatan lingkungan permukiman		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh		97.48 %	Rp85,435,000,000	84.03 %	Rp117,303,752,700							84.03%	Rp202,738,752,700	DPRKP	Kab. Pamekasan
				Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan		53,53 %	Rp10,283,070,600	54,53 %	Rp30,601,676,750							54,53%	Rp40,884,747,350	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
				Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan		63,65 %	Rp2,470,000,000	64,65 %	Rp6,242,806,800							64,65%	Rp8,712,806,800	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
		1.04. 01.0 8	Program Penyehatan Lingkungan Kawasan Permukiman	Prosentase Luasan Kawasan Kumuh Yang Tertangani	82.00 %	82.00 %	Rp31,630,000,000	85.00 %	Rp210,000,000							85.00%	Rp31,840,000,000	DPRKP	Kab. Pamekasan
				Prosentase Kawasan Permukiman Perkotaan yang tertangani		46.25 %	Rp25,420,000,000	47,75 %	Rp9,831,647,600							47,75%	Rp35,251,647,600	DPRKP	Kab. Pamekasan
				Prosentase Pondok pesantren yang tertangani		37.38 %	Rp22,785,000,000	38.00 %	Rp33,162,574,900							38.00%	Rp55,947,574,900	DPRKP	Kab. Pamekasan
				Prosentase Kawasan Perdesaan yang tertangani		35,38 %	Rp5,600,000,000	5 Kawasan	Rp80,299,530,200							5 Kawasan	Rp85,899,530,200	DPRKP	Kabupaten Pamekasan

		1.04.01.08.01	Kawasan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman	Jumlah kawasan lingkungan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya		7 Unit	Rp750,000,000	0	Rp0							7 Unit	Rp750,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.08.02	Penyehatan Lingkungan Permukiman Kawasan Pondok Pesantren	Jumlah sarana dan prasarana Lingkungan Pondok Pesantren yang dibangun / direhabilitasi		134 Unit	Rp22,785,000,000	208 Unit	Rp33,162,574,900							342 Unit	Rp55,947,574,900		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.08.03	Penyehatan Lingkungan Permukiman Kawasan Perkotaan	Jumlah sarana dan prasarana Wilayah Permukiman Perkotaan yang mendapat perbaikan lingkungan		240 Unit	Rp25,220,000,000	67 Unit	Rp9,331,647,600							307 Unit	Rp34,551,647,600		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.08.04	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Agropolitan RUPANANDUR	Jumlah sarana dan Prasarana Wilayah Kawasan Agropolitan yang dilaksanakan		70 Unit	Rp18,600,000,000	0	Rp0							70 Unit	Rp18,600,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.08.05	Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman	Jumlah sarana dan prasarana kawasan permukiman yang dibangun		5 Unit	Rp1,100,000,000	0	Rp0							5 Unit	Rp1,100,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.08.06	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Minapolitan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Minapolitan yang dikembangkan		77 Unit	Rp9,580,000,000	0	Rp0							77 Unit	Rp9,580,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.08.07	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pesisir	Jumlah sarana dan prasarana kawasan pesisir yang dibangun		9 Unit	Rp1,600,000,000	0	Rp0							9 Unit	Rp1,600,000,000		Kabupaten Pamekasan

		1.04.01.08.08	Normalisasi Saluran Permukiman Kawasan Perkotaan	Jumlah saluran permukiman kawasan perkotaan yang di normalisasi	10 Unit	Rp200,000,000	5 Unit	Rp500,000,000							15 Unit	Rp700,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.08.09	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kawasan Perdesaan	Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Perdesaan yang tertangani (Kawasan Minapolitan, Rupanandur, Kampung Batik, Kawasan Bagi Rasa, Kawasan Kumuh di perdesaan)	22 unit	Rp5,600,000,000	446 Unit	Rp74,099,530,200							468 Unit	Rp79,699,530,200		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.08.10	Penyediaan / Pengembangan Aplikasi Penyehatan Lingkungan Permukiman Berbasis IT	Jumlah Aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan	-	Rp0	0	Rp0								Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.08.11	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kawasan Perdesaan (DID Tambahan Tahap III)	Jumlah infrastruktur Permukiman di Kawasan Perdesaan yang tertangani	-	Rp0	40 Unit	Rp6,200,000,000							40 Unit	Rp6,200,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.08.36	Penyusunan Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman	Jumlah dokumen identifikasi Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman yang disusun	-	Rp0	2 dokumen	Rp210,000,000							2 dokumen	Rp210,000,000		Kabupaten Pamekasan

		1.04.01.09	Program Penataan bangunan dan lingkungan	Prosentase penyelenggaraan bangunan gedung	20%	22%	Rp2,674,000,000	24%	Rp2,450,000,000							24%	Rp5,124,000,000	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.09.01	Koordinasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah penyelenggaraan bangunan gedung yang dikoordinasikan	2.612 Unit	300 Unit	Rp264,000,000	150 Unit	Rp200,000,000							450 Unit	Rp464,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.09.02	Pembangunan Gedung Kantor / Instansi Pemerintahan Daerah	Jumlah Bangunan Gedung Kantor / Instansi Pemerintah daerah yang dibangun	0	0	Rp0	0	Rp0								Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.09.03	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor / Instansi Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor / Instansi Pemerintah Daerah yang disusun		4 Dokumen	Rp2,310,000,000	1 Dokumen	Rp300,000,000							5 Dokumen	Rp2,610,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.09.04	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor / Instansi Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor / Instansi Pemerintah Daerah yang dibangun	12 Unit	1 Unit	Rp100,000,000	9 Unit	Rp1,700,000,000							10 Unit	Rp1,800,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.09.06	Penyusunan Dokumen RTBL	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL) yang disusun	0	0	Rp0	0	Rp0								Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.09.07	Rehab Gedung Kantor / Instansi Pemerintahan daerah	Jumlah Bangunan Gedung Kantor / Instansi Pemerintah daerah yang direhab	0	0	Rp0	0	Rp0								Rp0		Kabupaten Pamekasan

		1.04.01.09.10	Penyediaan / Pengembangan Aplikasi Penataan Bangunan dan Lingkungan Berbasis IT	Jumlah Aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan	0	0	Rp0	0	Rp0							Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.09.11	Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Umum Kabupaten	Jumlah bangunan fasilitas umum kabupaten yang dibangun / yang direhabilitasi	0	0	Rp0	1 Dokumen	Rp250,000,000						1 Dokumen	Rp250,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Prosentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum		53,53 %	Rp10,283,070,600	54,53 %	Rp34,201,788,750						54,53%	Rp44,484,859,350	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
				Prosentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air limbah / Sanitasi	2,2%	63,65 %	Rp2,470,000,000	64,65 %	Rp7,812,004,800						64,65%	Rp10,282,004,800	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.10.01	Penyediaan Infrastruktur Air Minum / Air Bersih	Jumlah Lokasi Pengeboran air minum / air bersih		70 Unit	Rp9,676,280,000	0	Rp0						70 Unit	Rp9,676,280,000		Kab. Pamekasan
		1.04.01.10.02	Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah lokasi penerima bantuan PAMSIMAS	14 Unit	14 Unit	Rp100,000,000	12 Unit	Rp35,000,000						26 Unit	Rp135,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.10.03	Pipanisasi / Air Bersih / Air Minum	Jumlah lokasi yang mendapatkan pipanisasi / air bersih / air minum		2 Unit	Rp200,000,000	0	Rp0						2 Unit	Rp200,000,000		Kab. Pamekasan
		1.04.01.10.04	Koordinasi dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi	Jumlah lokasi yang mendapatkan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi yang terkoordinasi	1 Unit	0	Rp0	1 Dokumen	Rp150,000,000						1 Dokumen	Rp150,000,000		Kabupaten Pamekasan

		1.04.01.1.05	Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler)	Jumlah lokasi yang mendapatkan pembangunan sarana / prasarana sanitasi	1 Unit	Rp600,000,000	0	Rp0							1 Unit	Rp600,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.1.06	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM (DAK Reguler)	Jumlah sistem penyediaan air minum yang dilaksanakan	2 Unit	Rp1,870,718,000	0	Rp0							2 Unit	Rp1,870,718,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.1.07	Pembangunan Prasarana Sanitasi / Saluran Pembuang	Jumlah lokasi yang mendapatkan pembangunan sarana / prasarana sanitasi	7 Unit	Rp2,470,000,000	20 Unit	Rp3,288,756,800							27 Unit	Rp5,758,756,800		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.1.08	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Pengembangan dan Pembangunan SPAM dan Sanitasi yang disusun	1 Dokumen	Rp100,000,000	2 dokumen	Rp200,000,000							3 dokumen	Rp300,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.1.09	Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan)	Jumlah saluran pembuang / MCK yang dibangun / yang direhabilitasi	16 Unit	Rp6,300,000,000	180 Unit	Rp1,419,198,000							196 Unit	Rp7,719,198,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.1.10	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM (DAK Penugasan)	Jumlah lokasi yang mendapatkan pipanisasi air minum / air bersih	4 Unit	Rp700,000,000	7 Unit	Rp1,000,112,000							11 Unit	Rp1,700,112,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.1.12	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Jumlah lokasi penerima bantuan air minum dan sanitasi	0	Rp0	0	Rp0								Rp0		Kabupaten Pamekasan

		1.04.01.1.013	Pembangunan /Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan	Jumlah Jaringan Perpipaan yang dibangun/dikembangkan di wilayah perkotaan		0	Rp0	0	Rp0							Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.1.014	Pembangunan /Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Perdesaan	Jumlah Jaringan Perpipaan yang dibangun/dikembangkan di wilayah perdesaan		0	Rp0	280 Unit	Rp32,966,676,750						280 Unit	Rp32,966,676,750		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.1.017	Pembangunan IPAL Kombinasi MCK	Jumlah lokasi yang mendapatkan Pembangunan IPAL Kombinasi MCK		0	Rp0	0	Rp0							Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.1.019	Pembangunan MCK ++ / MCK Pondok Pesantren	Jumlah lokasi yang mendapatkan Pembangunan MCK++ Pondok Pesantren		0	Rp0	11 Unit	Rp1,754,050,000						11 Unit	Rp1,754,050,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.1.024	Pengeboran Air Minum/Air Bersih	Jumlah Lokasi Pengeboran air minum / air bersih		0	Rp0	0	Rp0							Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.1.026	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengelola SPAM	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengelola SPAM yang dibina		0	Rp0	0	Rp0							Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.1.029	Penentuan Titik Air Melalui Geolistrik	Jumlah dokumen lokasi titik air yang ditentukan melalui Geolistrik	1 unit	1 Dokumen	Rp100,000,000	0	Rp0						1 Dokumen	Rp100,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.1.032	Penyusunan Perencanaan Teknis Sanitasi Lingkungan Permukiman	Jumlah Kecamatan yang mendapat Validasi studi data base sanitasi yang disusun		0	Rp0	0	Rp0							Rp0		Kabupaten Pamekasan

		1.04.01.1.033	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	Jumlah lokasi yang mendapatkan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual		0	Rp0	170 Unit	Rp1,200,000,000						170 Unit	Rp1,200,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.1.052	Optimalisasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lokasi yang mendapatkan Infrastruktur Air Minum / Air Bersih		1 Unit	Rp106,790,600	0	Rp0							Rp106,790,600		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.1.053	Optimalisasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Optimalisasi DAK PAK)	Jumlah Lokasi yang mendapatkan Infrastruktur Air Minum / Air Bersih		1 Unit	Rp58,725,700	0	Rp0							Rp58,725,700		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.1.1	Program Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi	Prosentase tenaga terampil yang bersertifikat di bidang Jasa Konstruksi		24%	Rp100,000,000	24%	Rp100,860,000						24%	Rp200,860,000	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.1.1.01	Sosialisasi dan pelatihan tenaga terampil jasa konstruksi	jumlah tenaga terampil yang kompeten di bidang jasa konstruksi		30 orang	Rp50,000,000	70 orang	Rp100,860,000						100 orang	Rp150,860,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.1.1.02	Monitoring dan evaluasi rekomendasi izin usaha jasa konstruksi	jumlah badan usaha yang direkomendasikan untuk diterbitkan izin usaha jasa konstruksi		100 badan usaha	Rp50,000,000	0	Rp0						100 badan usaha	Rp50,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.1.1.03	Penyediaan / Pengembangan Aplikasi Jasa Konstruksi Berbasis IT	Jumlah Aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan				0	Rp0							Rp0		Kabupaten Pamekasan

SETELAH PERUBAHAN																			
Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah				Nilai SAKIP						A	Rp3,427,392,578	A	Rp5,157,439,417	A	Rp4,808,264,503	A	Rp13,393,096,498	DPRKP	Kab. Pamekasan
		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas						100%	Rp97,144,000	100%	Rp97,047,500	100%	Rp97,047,500	100%	Rp291,239,000	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas						4 Perencanaan	Rp97,144,000	4 Perencanaan	Rp97,047,500	4 Perencanaan	Rp97,047,500	4 Perencanaan	Rp291,239,000	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun						2 Dokumen	Rp25,000,000	2 Dokumen	Rp25,000,000	2 Dokumen	Rp25,000,000	2 Dokumen	Rp75,000,000		Kabupaten Pamekasan
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang dilaksanakan						1 Dokumen Data	Rp25,000,000	1 Dokumen Data	Rp25,000,000	1 Dokumen Data	Rp25,000,000	2 Dokumen Data	Rp75,000,000		Kab. Pamekasan
		1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan						39 Dokumen	Rp5,247,500	77 Dokumen	Rp5,247,500	83 Dokumen	Rp0	57 Dokumen	Rp10,495,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan						18 dokumen	Rp4,800,000	24 dokumen	Rp4,800,000	25 dokumen	Rp0	20 dokumen	Rp9,600,000		Kabupaten Pamekasan

		1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan						3 dokumen	Rp37,096,500	3 dokumen	Rp37,000,000	3 dokumen	Rp47,047,500	3 dokumen	Rp121,144,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik						100%	Rp1,859,061,952	100%	Rp3,093,906,530	100%	Rp3,093,906,530	100%	Rp8,046,875,012	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik						1 Unit Kerja	Rp1,859,061,952	1 Unit Kerja	Rp3,093,906,530	1 Unit Kerja	Rp3,093,906,530	1 Unit Kerja	Rp8,046,875,012	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan						14 Bulan	Rp1,859,061,952	14 Bulan	Rp3,093,906,530	14 Bulan	Rp3,093,906,530	14 Bulan	Rp8,046,875,012		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur						80%	Rp148,980,000	80%	Rp118,530,000	80%	Rp148,000,000	80%	Rp415,510,000	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi						53 Aparatur	Rp148,980,000	53 Aparatur	Rp118,530,000	53 Aparatur	Rp148,000,000	53 Aparatur	Rp415,510,000	DPRKP	Kab. Pamekasan

		1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi					53 Aparatur	Rp148,980,000	53 Aparatur	Rp118,530,000	53 Aparatur	Rp148,000,000	53 Aparatur	Rp415,510,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi					100%	Rp1,322,206,626	100%	Rp1,847,955,387	100%	Rp1,469,310,473	100%	Rp4,639,472,486	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi					6 Sarana	Rp268,060,850	6 Sarana	Rp351,173,719	6 Sarana	Rp373,447,969	6 Sarana	Rp992,682,538	DPRKP	Kab. Pamekasan
		1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					12 komponen	Rp5,760,000	12 komponen	Rp5,760,000	12 komponen	Rp5,760,000	36 komponen	Rp17,280,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					55 Peralatan Kantor	Rp28,000,000	51 Peralatan Kantor	Rp37,306,969	55 Peralatan Kantor	Rp34,569,069	165 Peralatan Kantor	Rp99,876,038		Kab. Pamekasan
				Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia					17 Alat Kebersihan	Rp6,442,100	16 Alat Kebersihan	Rp3,705,000	17 Alat Kebersihan	Rp6,442,900	51 Alat Kebersihan	Rp16,590,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan					12 bulan	Rp45,340,000	12 bulan	Rp39,700,000	12 bulan	Rp39,700,000	12 bulan	Rp124,740,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					6 Barang	Rp37,868,750	6 Barang	Rp37,721,750	6 Barang	Rp40,000,000	18 Barang	Rp115,590,500		Kab. Pamekasan

		1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan					80 Kali	Rp144,650,000	80 Kali	Rp226,980,000	80 Kali	Rp246,976,000	240 Kali	Rp618,606,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi					1 Prasarana	Rp325,269,700	3 Prasarana	Rp623,182,600	1 Prasarana	Rp174,965,600	1 Prasarana	Rp1,123,417,900	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan							1 Kendaraan	Rp330,093,500		Rp0	1 Kendaraan	Rp330,093,500		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan							5 Kendaraan	Rp118,123,500		Rp0	5 Kendaraan	Rp118,123,500		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi					98 unit	Rp325,269,700	27 unit	Rp174,965,600	15 unit	Rp174,965,600	144 Unit	Rp675,200,900		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan					3 Jasa Penunjang	Rp517,727,640	3 Jasa Penunjang	Rp634,939,068	3 Jasa Penunjang	Rp642,107,904	3 Jasa Penunjang	Rp1,794,774,612	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan					2 Jasa Layanan	Rp4,125,000	2 Jasa Layanan	Rp8,375,000	2 Jasa Layanan	Rp8,375,000	2 Jasa Layanan	Rp20,875,000		Kab. Pamekasan

		1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik yang disediakan					6 Jasa Layanan	Rp76,352,640	6 Jasa Layanan	Rp70,664,068	6 Jasa Layanan	Rp77,832,904	6 Jasa Layanan	Rp224,849,612		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan					11 Jasa Layanan	Rp437,250,000	11 Jasa Layanan	Rp555,900,000	11 Jasa Layanan	Rp555,900,000	11 Jasa Layanan	Rp1,549,050,000		Kab. Pamekasan
		1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah					3 Pemeliharaan	Rp211,148,436	3 Pemeliharaan	Rp238,660,000	3 Pemeliharaan	Rp278,789,000	3 Pemeliharaan	Rp728,597,436	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan					5 Kendaraan	Rp128,263,436	5 Kendaraan	Rp119,921,000	5 Kendaraan	Rp150,000,000	5 Kendaraan	Rp398,184,436		Kabupaten Pamekasan
		1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dikelola					147 unit	Rp28,815,000	148 unit	Rp28,789,000	148 unit	Rp28,789,000	443 unit	Rp86,393,000		Kab. Pamekasan
		1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi					1 Gedung Kantor	Rp35,000,000	19 Ruang	Rp89,950,000	19 Ruang	Rp100,000,000	19 Ruang	Rp224,950,000		Kabupaten Pamekasan
				Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara / direhabilitasi					1 Rumah Dinas	Rp19,070,000						Rp19,070,000		Kabupaten Pamekasan

Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman			Rasio Permukiman Layak Huni												Rp0		Kab. Pamekasan
Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat			Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan					55,53%	Rp44,604,474,061	56,53 %	Rp32,687,139,869	57.53 %	Rp22,590,952,900	57.53%	Rp99,882,566,830	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM					80%	Rp44,604,474,061	80%	Rp32,687,139,869	80 %	Rp22,590,952,900	80 %	Rp99,882,566,830	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan					7 SPAM	Rp44,604,474,061	12 SPAM	Rp32,687,139,869	12 SPAM	Rp22,590,952,900	7 SPAM	Rp99,882,566,830	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, Strategi dan teknis SPAM yang disusun					2 dokumen	Rp199,999,726	2 dokumen	Rp300,000,000	2 dokumen	Rp300,000,000	2 dokumen	Rp799,999,726		Kabupaten Pamekasan
	1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang dibangun							10 desa/kel	Rp650,000,000	10 desa/kel	Rp650,000,000	20 desa/kel	Rp1,300,000,000		Kabupaten Pamekasan
	1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang dibangun di kawasan perdesaan					311 Dusun	Rp37,024,999,851	2 Dusun	Rp21,197,496,851	97 Dusun	Rp13,161,000,000	309 Dusun	Rp71,383,496,702		Kabupaten Pamekasan

		1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang ditingkatkan							10 Desa	Rp500,000,000	10 desa/kel	Rp500,000,000	20 desa/kel	Rp1,000,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah SPAM di kawasan perdesaan yang ditingkatkan kualitasnya					1 Desa	Rp2,642,750,874	11 Desa	Rp5,058,690,118	1 Desa	Rp2,499,000,000	3 Desa	Rp10,200,440,992		Kabupaten Pamekasan
		1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang diperluas							10 Desa	Rp250,000,000	10 desa/kel	Rp500,000,000	20 desa/kel	Rp750,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.03.2.01.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan yang diperbaiki					10 Desa	Rp1,100,000,939	5 Desa	Rp550,000,000	5 Desa	Rp550,000,000	20 Desa	Rp2,200,000,939		Kabupaten Pamekasan
		1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	jumlah penerima SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat yang dibina dan diawasi					5 KKM	Rp1,494,999,900	4 KKM	Rp1,360,410,900	3 KKM	Rp1,360,410,900	42 KKM	Rp4,215,821,700		Kabupaten Pamekasan
		1.03.03.2.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Jumlah pelaksanaan kerjasama SPAM yang dibina dan diawasi					1 unit	Rp50,000,000	1 unit	Rp150,000,000	1 unit	Rp150,000,000	3 unit	Rp350,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM kawasan perkotaan yang dipelihara							1 kegiatan	Rp100,000,000	1 paket	Rp100,000,000	2 paket	Rp200,000,000		Kabupaten Pamekasan

	1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang diperluas di kawasan perdesaan					10 Desa	Rp2,091,722,771	12 Desa	Rp2,320,542,000	12 Desa	Rp2,320,542,000	12 Desa	Rp6,732,806,771		Kabupaten Pamekasan
	1.03.03.2.01.20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan yg diperbaiki							10 desa/kel	Rp250,000,000	10 desa/kel	Rp500,000,000	20 desa/kel	Rp750,000,000		Kabupaten Pamekasan
Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat			Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan					65,65%	Rp22,462,778,999	66,65 %	Rp9,729,818,799	67,65 %	Rp11,565,818,799	67,65%	Rp43,758,416,597	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangkan					65,65%	Rp17,537,779,000	66,65 %	Rp7,004,688,300	67,65 %	Rp8,840,688,300	67,65%	Rp33,383,155,600	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan					2 SPAL	Rp17,537,779,000	2 SPAL	Rp7,004,688,300	13 SPAL	Rp8,840,688,300	2 SPAL	Rp33,383,155,600	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota yang disusun									1 dokumen	Rp250,000,000	1 dokumen	Rp250,000,000		Kabupaten Pamekasan

	1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala yang direhabilitasi/ditingkatkan						19 Desa	Rp3,136,650,000	3 Desa	Rp1,306,745,300	3 Desa	Rp1,306,745,300	25 Desa	Rp5,750,140,600		Kabupaten Pamekasan
	1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM Teknik pengelolaan air limbah domestik yang dibina								5 lokasi	Rp100,000,000	5 lokasi	Rp100,000,000	10 lokasi	Rp200,000,000		Kabupaten Pamekasan
	1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah KSM yang mengikuti Pelatihan penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik								5 KSM	Rp100,000,000	5 KSM	Rp100,000,000	3 bln	Rp200,000,000		Kabupaten Pamekasan
	1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM lembaga pengelola air limbah domestik yang dikembangkan								5 Pengelola	Rp100,000,000	5 Pengelola	Rp100,000,000	10 Pengelola	Rp200,000,000		Kabupaten Pamekasan
	1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dipelihara								2 Desa	Rp100,000,000	1 Paket	Rp100,000,000	2 Paket	Rp200,000,000		Kabupaten Pamekasan
	1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman yang dilakukan								1 Kegiatan	Rp114,000,000	1 Paket	Rp200,000,000	2 Paket	Rp314,000,000		Kabupaten Pamekasan

	1.03.05.2.01.1.2	Pembangunan /Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sistem pengelolaan air limbah terpusat yang dibangun						30 Desa	Rp14,401,129,000	1 Desa	Rp5,083,943,000	9 Desa	Rp5,083,943,000	30 Desa	Rp24,569,015,000		Kabupaten Pamekasan
	1.03.05.2.01.1.3	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang disediakan								0		1 unit	Rp500,000,000	1 unit	Rp500,000,000		Kab. Pamekasan
	1.03.05.2.01.1.4	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Jasa Penyedotan Lumpur Tinja yang disediakan								0		2 orang	Rp100,000,000	2 orang	Rp100,000,000		Kab. Pamekasan
	1.03.05.2.01.1.5	Pembangunan /Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Sarana dan Prasarana IPLT yang dibangun								1 unit	Rp100,000,000	1 unit	Rp700,000,000	2 unit	Rp800,000,000		Kab. Pamekasan
	1.03.05.2.01.1.6	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Sarana dan Prasarana IPLT yang direhabilitasi/ditingkatkan								0		1 unit	Rp200,000,000	1 unit	Rp200,000,000		Kabupaten Pamekasan
	1.03.05.2.01.1.7	Supervisi Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT yang dilakukan								0		1 dokumen	Rp100,000,000	1 dokumen	Rp100,000,000		Kab. Pamekasan
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase yang Dikelola dan Dikembangkan						49,25%	Rp4,924,999,999	50,75%	Rp2,725,130,499	52,25%	Rp2,725,130,499	52,25%	Rp10,375,260,997	DPRKP	Kabupaten Pamekasan

		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan						1 Sistem Drainase	Rp4,924,999,999	3 Sistem Drainase	Rp2,725,130,499	3 Sistem Drainase	Rp2,725,130,499	1 Sistem Drainase	Rp10,375,260,997	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
		1.03.06.2.01.1.2	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah sisten drainase lingkungan yang dibangun								1 Desa	Rp1,200,000,000	1 Desa	Rp1,200,000,000	2 Desa	Rp2,400,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.06.2.01.1.4	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	jumlah saluran drainase lingkungan yang direhabilitasi					35 Desa	Rp4,924,999,999		3 Desa	Rp1,425,130,499	2 Desa	Rp1,425,130,499	39 Desa	Rp7,775,260,997		Kabupaten Pamekasan
		1.03.06.2.01.1.6	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun								1 Dokumen	Rp100,000,000	1 Dokumen	Rp100,000,000	2 Dokumen	Rp200,000,000		Kabupaten Pamekasan
			Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh						63.03%	Rp84,514,474,480	42%	Rp79,717,386,962	21%	Rp27,765,000,000	21%	Rp191,996,861,442	DPRKP	Kab. Pamekasan
		1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman yang Dikembangkan						60%	Rp84,514,474,480	70%	Rp77,409,894,800	80 %	Rp23,190,000,000	80 %	Rp185,114,369,280	DPRKP	Kab. Pamekasan
		1.03.07.2.01	Penyelenggaraa n Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis yang diselenggarakan						1 Infrast ruktur	Rp84,514,474,480	1 Infrast ruktur	Rp77,409,894,800	1 Infrast ruktur	Rp23,190,000,000	1 Infrast ruktur	Rp185,114,369,280	DPRKP	Kabupaten Pamekasan

	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dibangun dan dikembangkan						475 Unit	Rp84,514,474,480	485 Unit	Rp77,009,894,833	149 Unit	Rp22,790,000,000	983 Unit	Rp184,314,369,313		Kabupaten Pamekasan
	1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dipelihara dan dikembangkan								2 unit	Rp199,999,967	2 unit	Rp200,000,000	4 unit	Rp399,999,967		Kabupaten Pamekasan
	1.03.07.2.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang diawasi dan dikembangkan								2 Dokumen	Rp200,000,000	38 Unit	Rp200,000,000	40 unit	Rp400,000,000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Rumah Layak Huni							0	96,04 %	Rp2,307,492,162	96,27 %	Rp4,575,000,000	96,27%	Rp6,882,492,162	DPRKP	Kab. Pamekasan
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah data rumah korban bencana atau relokasi program yang disediakan							0	6 Pendataan	Rp599,999,580	6 Pendataan	Rp2,100,000,000	6 Pendataan	Rp2,699,999,580	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
	1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program yang diidentifikasi								2 Kecamatan	Rp99,999,930	7 Kecamatan	Rp350,000,000	9 Kecamatan	Rp449,999,930		Kabupaten Pamekasan

	1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	jumlah lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan yang diidentifikasi							2 Kecamatan	Rp99,999,930	7 Kecamatan	Rp350,000,000	9 Kecamatan	Rp449,999,930		Kabupaten Pamekasan
	1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	jumlah data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani yang disediakan							2 Kecamatan	Rp99,999,930	7 Kecamatan	Rp350,000,000	9 Kecamatan	Rp449,999,930		Kabupaten Pamekasan
	1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	jumlah data tingkat kerusakan rumah akibat bencana yang disediakan							2 Kecamatan	Rp99,999,930	7 Kecamatan	Rp350,000,000	9 Kecamatan	Rp449,999,930		Kabupaten Pamekasan
	1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah data penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program yang disediakan							2 Kecamatan	Rp99,999,930	7 Kecamatan	Rp350,000,000	9 Kecamatan	Rp449,999,930		Kabupaten Pamekasan
	1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	jumlah data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus yang disediakan							2 Kecamatan	Rp99,999,930	7 Kecamatan	Rp350,000,000	9 Kecamatan	Rp449,999,930		Kabupaten Pamekasan
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan							40,39 %	Rp1,507,499,990	100%	Rp2,275,000,000	100%	Rp3,782,499,990	DPRKP	Kabupaten Pamekasan

	1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	jumlah rumah bagi korban bencana yang diperbaiki							41 Unit	Rp717,500,000	50 Unit	Rp875,000,000	91 Unit	Rp1,592,500,000		Kab. Pamekasan
	1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah dokumen site plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang disusun							1 Dokumen	Rp49,999,990	1 Dokumen	Rp50,000,000	2 Dokumen	Rp99,999,990		Kabupaten Pamekasan
	1.04.02.2.03.03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	jumlah lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana yang diadakan							1 Unit	Rp100,000,000	1 Unit	Rp100,000,000	2 Unit	Rp200,000,000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	jumlah rumah bagi korban bencana yang dibangun							10 Unit	Rp300,000,000	20 Unit	Rp600,000,000	30 Unit	Rp900,000,000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah rumah khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program yang dibangun							10 Unit	Rp300,000,000	20 Unit	Rp600,000,000	30 Unit	Rp900,000,000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.02.2.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten/kota yang dipelihara							40 Unit	Rp40,000,000	50 Unit	Rp50,000,000	90 Unit	Rp90,000,000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan							25%	Rp100,000,000	50%	Rp100,000,000	50%	Rp200,000,000	DPRKP	Kabupaten Pamekasan

	1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	jumlah penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang difasilitasi							5 Izin	Rp50,000,000	5 Izin	Rp50,000,000	10 izin	Rp100,000,000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	jumlah Pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan yang dikoordinasikan							5 Koordinasi	Rp50,000,000	5 Koordinasi	Rp50,000,000	10 Koordinasi	Rp100,000,000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah sertifikat kepemilikan bangunan gedung yang diterbitkan							50 Unit	Rp99,992,592	100%	Rp100,000,000	100%	Rp199,992,592	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
	1.04.02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	jumlah Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) yang dikoordinasikan							100 Unit	Rp99,992,592	100 Unit	Rp100,000,000	200 Unit	Rp199,992,592		Kabupaten Pamekasan
Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat			Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni					97,37%	Rp2,838,234,650	97,57 %	Rp12,604,920,000	97,77 %	Rp14,119,920,000	97,77%	Rp29,563,074,650	DPRKP	Kab. Pamekasan
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani					89%	Rp2,838,234,650	92 %	Rp12,604,920,000	94 %	Rp14,119,920,000	94 %	Rp29,563,074,650	DPRKP	Kab. Pamekasan

	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan							50%	Rp1,035,000,000	100%	Rp950,000,000		Rp1,985,000,000	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
	1.04.03.2.02.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik yang dilakukan							1 Paket	Rp300,000,000	1 Paket	Rp300,000,000	2 paket	Rp600,000,000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.03.2.02.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Kumuh yang disusun							1 Dokumen	Rp650,000,000	3 Dokumen	Rp350,000,000	4 Dokumen	Rp1,000,000,000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.03.2.02.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Kumuh yang diselenggarakan							1 Paket	Rp85,000,000	1 Paket	Rp300,000,000	2 paket	Rp385,000,000		Kabupaten Pamekasan

	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya						1 Kawasan	Rp349,999,900	1 Kawasan	Rp350,000,000	1 Kawasan	Rp650,000,000	1 Kawasan	Rp1,349,999,900	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
	1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh yang dilakukan									Rp0				Rp0		Kabupaten Pamekasan
	1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun						3 Dokumen	Rp349,999,900	3 Dokumen	Rp350,000,000	3 Dokumen	Rp350,000,000	9 Dokumen	Rp1,049,999,900		Kabupaten Pamekasan
	1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Pereemajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Pereemajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan									Rp0	1 Paket	Rp300,000,000	1 Paket	Rp300,000,000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya						2 Peningkatan Kualitas	Rp2,488,234,750	2 Peningkatan Kualitas	Rp11,219,920,000	2 Peningkatan Kualitas	Rp12,519,920,000	2 Peningkatan Kualitas	Rp26,228,074,750	DPRKP	Kabupaten Pamekasan

		1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Permukiman Kumuh yang disusun									Rp0	3 Dokumen	Rp350,000,000	3 Dokumen	Rp350,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki					61 Unit	Rp1,275,260,000	270 Unit	Rp9,962,420,000	270 Unit	Rp9,962,420,000	446 Orang	Rp21,200,100,000		Kab. Pamekasan	
		1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan					3 Koordnasi	Rp1,212,974,750	3 Koordinasi	Rp1,257,500,000	3 Koordinasi	Rp1,257,500,000	9 Koordnasi	Rp3,727,974,750		Kabupaten Pamekasan	
		1.04.03.2.03.05	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tangga yang terkena program peremajaan permukiman kumuh yang menerima bantuan uang sewa rumah Tinggal sementara								Rp0	10 KK	Rp100,000,000	10 KK	Rp100,000,000		Kabupaten Pamekasan	
		1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah luasan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang telah terbangun								Rp0	10 Unit	Rp500,000,000	10 Unit	Rp500,000,000		Kabupaten Pamekasan	

		1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh yang disusun									Rp0	3 Dokumen	Rp350,000,000	3 Dokumen	Rp350,000,000		Kabupaten Pamekasan
	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart			Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung					67.83%	Rp12,890,900,000	78.94 %	Rp13,542,500,000	90.06 %	Rp18,000,000,000	90.06 %	Rp44,433,400,000	DPRKP		
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang tertata					26%	Rp200,000,000	28%	Rp300,000,000	30 %	Rp300,000,000	30 %	Rp800,000,000	DPRKP	Kab. Pamekasan	
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan					2 Penyelenggaraan	Rp200,000,000	2 Penyelenggaraan	Rp300,000,000	2 Penyelenggaraan	Rp300,000,000	2 Penyelenggaraan	Rp800,000,000	DPRKP	Kabupaten Pamekasan	
		1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penerbitan IMB, SLF peran TABG, Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG yang diselenggarakan					200 Unit	Rp200,000,000	200 Unit	Rp300,000,000	200 Unit	Rp300,000,000	600 Unit	Rp800,000,000		Kabupaten Pamekasan	

	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase Rumah Layak Huni dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh						95,80%	Rp12,635,000,000	96,04 %	Rp13,142,500,000	96,27 %	Rp17,500,000,000	96,27%	Rp43,277,500,000	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan						1 Perbaikan RTLH	Rp12,635,000,000	1 Perbaikan RTLH	Rp13,142,500,000	1 Perbaikan RTLH	Rp17,500,000,000	1 Perbaikan RTLH	Rp43,277,500,000	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
	1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki						722 Unit	Rp12,635,000,000	751 Unit	Rp13,142,500,000	1000 Unit	Rp17,500,000,000	2473 Unit	Rp43,277,500,000		Kabupaten Pamekasan
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang ditingkatkan						33,33%	Rp55,900,000	66,66 %	Rp100,000,000	100 %	Rp200,000,000	100 %	Rp355,900,000	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU						11,11%	Rp55,900,000	44,44 %	Rp100,000,000	77,77 %	Rp200,000,000	77,77%	Rp355,900,000	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
	1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan PSU perumahan yang disusun							Rp0					0 %	Rp0		Kab. Pamekasan

		1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	jumlah PSU yang dibangun							Rp0		Rp0			0 %	Rp0		Kabupaten Pamekasan
		1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah PSU perumahan yang diserahkan oleh pihak pengembang kepada Pemkab					1 PSU	Rp55,900,000	2 PSU	Rp100,000,000	3 PSU	Rp200,000,000	6 Kawasan	Rp355,900,000		Kabupaten Pamekasan	
	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart			Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas / Laik Fungsi					20%	Rp36,299,899,282	60 %	Rp42,825,000,000	80 %	Rp20,650,000,000	80 %	Rp99,774,899,282	DPRKP	Kabupaten Pamekasan	
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan					2 Penyelenggaraan	Rp4,500,459,932	2 Penyelenggaraan	Rp9,600,000,000	2 Penyelenggaraan	Rp9,600,000,000	2 Penyelenggaraan	Rp23,700,459,932	DPRKP	Kabupaten Pamekasan	

	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung/kantor/instansi pemerintah daerah yang disusun					2 Dokumen	Rp100,000,000	6 Dokumen	Rp435,000,000	6 Dokumen	Rp435,000,000	14 Dokumen	Rp970,000,000		Kabupaten Pamekasan
			jumlah sarana dan prasarana pendukung bangunan gedung kantor					12 Sarpras	Rp2,100,000,000	4 Sarpras	Rp800,000,000	4 Sarpras	Rp800,000,000	20 Sarpras	Rp3,700,000,000		Kabupaten Pamekasan
			jumlah gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang dibangun diawasi dan dimanfaatkan					1 Gedung Kantor	Rp2,300,459,932	2 Gedung Kantor	Rp8,365,000,000	2 Gedung Kantor	Rp8,365,000,000	5 Gedung Kantor	Rp19,030,459,932		Kabupaten Pamekasan
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata					38,5%	Rp31,549,439,350	39%	Rp32,850,000,000	40 %	Rp10,600,000,000	40 %	Rp74,999,439,350	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan					1 Penataan Bangunan	Rp31,549,439,350	1 Penataan Bangunan	Rp32,850,000,000	1 Penataan Bangunan	Rp10,600,000,000	2 Penataan Bangunan	Rp74,999,439,350	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
	1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata					200 Unit	Rp31,549,439,350	200 Unit	Rp32,850,000,000	200 Unit	Rp10,600,000,000	600 unit	Rp74,999,439,350		Kab. Pamekasan
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil yang Bersertifikat di Bidang Jasa Konstruksi					24%	Rp250,000,000	24%	Rp375,000,000	24 %	Rp450,000,000	24 %	Rp1,075,000,000	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan					2 Penyelenggaraan	Rp200,000,000	2 Penyelenggaraan	Rp200,000,000	2 Penyelenggaraan	Rp250,000,000	2 Penyelenggaraan	Rp650,000,000	DPRKP	Kabupaten Pamekasan

		1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang dilaksanakan					100 Orang	Rp150,000,000	100 Orang	Rp150,000,000	150 Orang	Rp200,000,000	350 Orang	Rp500,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil yang bersertifikat					100 Orang	Rp50,000,000	100 Orang	Rp50,000,000	150 Orang	Rp50,000,000	350 Orang	Rp150,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan					1 IUJK	Rp50,000,000	1 IUJK	Rp0	1 IUJK	Rp0	1 IUJK	Rp50,000,000	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
		1.03.11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah penerbitan rekomendasi teknis IUJK nasional yang difasilitasi					100 Badan Usaha	Rp50,000,000	0	Rp0	0	Rp0	100 Badan Usaha	Rp50,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi							28,57 %	Rp175,000,000	57,14 %	Rp200,000,000	57,14%	Rp375,000,000	DPRKP	Kabupaten Pamekasan
		1.03.11.2.04.01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP yang disusun							1 Dokumen	Rp25,000,000	1 Dokumen	Rp25,000,000	2 Dokumen	Rp50,000,000		Kabupaten Pamekasan

		1.03. 11.2. 04.0 2	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta Bimbingan Teknis yang memahami tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi								100 Orang	Rp100,000,000	100 Orang	Rp100,000,000	200 Orang	Rp200,000,000		Kabupaten Pamekasan
		1.03. 11.2. 04.0 3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah badan usaha jasa konstruksi yang diawasi dan dievaluasi, tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi								50 Badan Usaha Jasa Konstruksi	Rp50,000,000	100 Badan Usaha Jasa Konstruksi	Rp75,000,000	150 Badan Usaha Jasa Konstruksi	Rp125,000,000		Kabupaten Pamekasan

➤ Dokumen IKU Kepala Perangkat Daerah dan Perubahannya

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
SEBELUM PERUBAHAN					
1.	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman dengan Kondisi Baik	(Jumlah PSU (Rumah Layak Huni, Air Minum, Sanitasi) Permukiman dalam kondisi baik / Jumlah PSU Permukiman) x 100%	BAPPEDA	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.	Meningkatnya Kualitas perumahan dan bangunan gedung sesuai standart	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu) X 100%	Data BPS Kabupaten Pamekasan Tahun 2016	Bidang Perumahan dan Tata Bangunan
		Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	(Jumlah bangunan ber - IMB / Jumlah Bangunan) X 100 %	Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Bidang Perumahan dan Tata Bangunan
		Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	(Jumlah Gedung Penyelenggaraan Pemerintah yang Layak Fungsi / Jumlah Gedung Penyelenggaraan Pemerintah) X 100%	Dokumen Pendataan Bangunan Gedung	Bidang Perumahan dan Tata Bangunan
3.	Meningkatnya Penyehatan Lingkungan Permukiman	Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	(Luas Lingkungan Permukiman Kumuh/Luas Wilayah) x100%	SK Bupati tentang Kawasan Kumuh Perkotaan	Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	(Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi / Jumlah Penduduk Seluruhnya) X 100 %	Data Rencana Induk SPAM (RISPAM) Kabupaten Pamekasan	Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	(Jumlah penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang terlindungi / Jumlah Penduduk Seluruhnya) X 100%	Data Strategi Sanitasi (SSK) Kabupaten Pamekasan	Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP OPD	((Jumlah dokumen SAKIP yang disusun / Jumlah dokumen yang disusun pada tahun (N)) X 100%	Inspektorat	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
SETELAH PERUBAHAN					
1.	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	(Luas permukiman layak huni / Luas wilayah permukiman) X 100%	DPRKP	DPRKP
2	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung	(Jumlah bangunan gedung yang ber - IMB / Jumlah seluruh bangunan gedung) X 100 %	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan	DPRKP

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung	
		Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas/ Laik Fungsi	(Jumlah Gedung Penyelenggaraan Pemerintah yang Layak Fungsi / Jumlah Gedung Penyelenggaraan Pemerintah) X 100%	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/Prt/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	DPRKP
3	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	(Jumlah rumah layak huni / Jumlah seluruh layak huni) X 100%	Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota	DPRKP

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	(Luas Lingkungan Permukiman Kumuh/Luas Wilayah) X 100%	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	DPRKP
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	(Jumlah rumah tangga dengan air minum layak / Jumlah seluruh rumah tangga) X 100 %	DPRKP	DPRKP
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	(Jumlah rumah tangga dengan layanan sanitasi layak / Jumlah seluruh rumah tangga) X 100 %	DPRKP	DPRKP
4	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Penilaian SAKIP 2020 : Perencanaan Kinerja 25% Pengukuran Kinerja 25% Pelaporan Kinerja 10% Evaluasi Kinerja 20% Capaian Kinerja 20%	Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Sosial.	DPRKP

➤ Matriks Renja 2021 dan Perubahannya

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021
dan Perkiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Pamekasan

Nama SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Kabupaten Pamekasan			Rp167,463,807,112	Rp207,038,154,050	DAU + DAK			Rp196,264,205,047
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		Kabupaten Pamekasan			Rp149,354,425,201	Rp188,081,626,822	DAU + DAK			Rp162,951,853,468
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	Kabupaten Pamekasan	80%	80%	Rp34,204,475,200	Rp44,604,474,061	DAU + DAK		80%	Rp32,687,139,869
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan	Kabupaten Pamekasan	7 SPAM	7 SPAM	Rp34,204,475,200	Rp44,604,474,061	DAU + DAK		12 SPAM	Rp32,687,139,869
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, Strategi dan teknis SPAM yang disusun	Kabupaten Pamekasan	2 dokumen	2 dokumen	Rp199,999,776	Rp199,999,726	DAU		2 Dokumen	Rp300,000,000
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang dibangun di kawasan perdesaan	Kabupaten Pamekasan	203 unit	311 Dusun	Rp26,524,999,929	Rp37,024,999,851	DAU		177 Dusun	Rp21,197,496,851

1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah SPAM di kawasan perdesaan yang ditingkatkan kualitasnya	Kabupaten Pamekasan	8 Desa	1 Desa	Rp3,442,752,927	Rp2,642,750,874	DAK		11 Desa	Rp5,058,690,118
1.03.03.2.01.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan yang diperbaiki	Kabupaten Pamekasan	3 unit	10 Desa	Rp299,999,897	Rp1,100,000,939	DAU		5 Desa	Rp550,000,000
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	jumlah penerima SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat yang dibina dan diawasi	Kabupaten Pamekasan	38 KKM	5 KKM	Rp1,494,999,900	Rp1,494,999,900	DAU		4 KKM	Rp1,360,410,900
1.03.03.2.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Jumlah pelaksanaan kerjasama SPAM yang dibina dan diawasi	Kabupaten Pamekasan	1 unit	1 unit	Rp150,000,000	Rp50,000,000	DAU		1 Unit	Rp150,000,000
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang diperluas di kawasan perdesaan	Kabupaten Pamekasan	9 Desa	10 Desa	Rp2,091,722,771	Rp2,091,722,771	DAK		12 Desa	Rp2,320,542,000
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang dibangun	Kabupaten Pamekasan					DAU		10 desa/kel	Rp650,000,000
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang ditingkatkan	Kabupaten Pamekasan					DAU		10 Desa	Rp500,000,000
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang diperluas	Kabupaten Pamekasan					DAU		10 Desa	Rp250,000,000
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM kawasan perkotaan yang dipelihara	Kabupaten Pamekasan					DAU		1 kegiatan	Rp100,000,000
1.03.03.2.01.20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan yg diperbaiki	Kabupaten Pamekasan					DAU		10 desa/kel	Rp250,000,000
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangkan	Kabupaten Pamekasan	65,65%	65,65%	Rp17,637,779,000	Rp17,537,779,000	DAU + DAK		66,65%	Rp7,004,688,300
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan	Kabupaten Pamekasan	1 SPALD	2 SPAL	Rp17,637,779,000	Rp17,537,779,000	DAU + DAK		8 SPALD	Rp7,004,688,300

1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala yang direhabilitasi/ditingkatkan	Kabupaten Pamekasan	31 Desa	19 Desa	Rp17,637,779,000	Rp3,136,650,000	DAU		3 Desa	Rp1,306,745,300
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sistem pengelolaan air limbah terpusat yang dibangun	Kabupaten Pamekasan		30 Desa	Rp0	Rp14,401,129,000	DAK		9 Desa	Rp5,083,943,000
1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM Teknik pengelolaan air limbah domestik yang dibina	Kabupaten Pamekasan					DAU		5 lokasi	Rp100,000,000
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah KSM yang mengikuti Pelatihan penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Kabupaten Pamekasan					DAU		5 KSM	Rp100,000,000
1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM lembaga pengelola air limbah domestik yg dikembangkan	Kabupaten Pamekasan					DAU		5 Pengelola	Rp100,000,000
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dipelihara	Kabupaten Pamekasan					DAU		2 Desa	Rp100,000,000
1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman yang dilakukan	Kabupaten Pamekasan					DAU		1 Kegiatan	Rp114,000,000
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Sarana dan Prasarana IPLT yang dibangun	Kabupaten Pamekasan					DAU		1 unit	Rp100,000,000
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase yang Dikelola dan Dikembangkan	Kabupaten Pamekasan	49,25%	49,25%	Rp14,439,999,575	Rp4,924,999,999	DAU		50,75%	Rp2,725,130,499
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan	Kabupaten Pamekasan	2 Sistem Drainase	1 Sistem Drainase	Rp14,439,999,575	Rp4,924,999,999	DAU		3 Sistem Drainase	Rp2,725,130,499

1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah sisten drainase lingkungan yang dibangun	Kabupaten Pamekasan	43 unit		Rp5,539,999,615	-	DAU		1 Desa	Rp1,200,000,000
1.03.06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	jumlah saluran drainase lingkungan yang direhabilitasi	Kabupaten Pamekasan	42 unit	35 Desa	Rp8,899,999,960	Rp4,924,999,999	DAU		3 Desa	Rp1,425,130,499
1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Kabupaten Pamekasan							1 Dokumen	Rp100,000,000
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman yang Dikembangkan	Kabupaten Pamekasan	60%	60%	Rp54,277,999,408	Rp84,514,474,480	DAU		70%	Rp77,409,894,800
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis yang diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan	1 Infrastruktur	1 Infrastruktur	Rp54,277,999,408	Rp84,514,474,480	DAU		1 Infrastruktur	Rp77,409,894,800
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dibangun dan dikembangkan	Kabupaten Pamekasan	334 unit	550 Unit	Rp54,277,999,408	Rp84,514,474,480	DAU		485 Unit	Rp77,009,894,833
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dipelihara dan dikembangkan	Kabupaten Pamekasan					DAU		2 unit	Rp199,999,967
1.03.07.2.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang diawasi dan dikembangkan	Kabupaten Pamekasan					DAU		2 Dokumen	Rp200,000,000
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang tertata	Kabupaten Pamekasan	0.26	0.26	Rp7,444,172,338	Rp4,700,459,932	DAU		28%	Rp9,900,000,000
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan	4 Koordinasi	2 Penyelenggaraan	Rp7,444,172,338	Rp4,700,459,932	DAU		2 Penyelenggaraan	Rp9,900,000,000

1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penerbitan IMB, SLF peran TABG, Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG yang diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan	200 Unit	200 Unit	Rp200,000,000	Rp200,000,000	DAU		200 Unit	Rp300,000,000
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang disusun	Kabupaten Pamekasan	4 Dokumen	2 Dokumen	Rp7,244,172,338	Rp4,500,459,932	DAU		6 Dokumen	Rp435,000,000
		jumlah sarana dan prasarana pendukung bangunan gedung kantor	Kabupaten Pamekasan	5 fasum	12 Sarpras			DAU		4 Sarpras	Rp800,000,000
		jumlah gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang dibangun diawasi dan dimanfaatkan	Kabupaten Pamekasan	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor			DAU		2 Gedung Kantor	Rp8,365,000,000
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	Kabupaten Pamekasan	38,5%	38,5%	Rp21,099,999,680	Rp31,549,439,350	DAU		39.00%	Rp32,850,000,000
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan	2 Penataan Bangunan	1 Penataan Bangunan	Rp21,099,999,680	Rp31,549,439,350	DAU		1 Penataan Bangunan	Rp32,850,000,000
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana sistem penataan kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan yang disusun	Kabupaten Pamekasan	1 Dokumen		Rp299,999,980		DAU		-	Rp0
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata	Kabupaten Pamekasan	147 Unit	200 Unit	Rp20,799,999,700	Rp31,549,439,350	DAU		200 Unit	Rp32,850,000,000
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil yang Bersertifikat di Bidang Jasa Konstruksi	Kabupaten Pamekasan	24%	24%	Rp250,000,000	Rp250,000,000	DAU		24%	Rp375,000,000

1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan	2 Penyelenggaraan	2 Penyelenggaraan	Rp200,000,000	Rp200,000,000	DAU		2 Penyelenggaraan	Rp200,000,000
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang dilaksanakan	Kabupaten Pamekasan	100 Orang	100 Orang	Rp150,000,000	Rp150,000,000	DAU		100 Orang	Rp150,000,000
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil yang bersertifikat	Kabupaten Pamekasan	100 Orang	100 Orang	Rp50,000,000	Rp50,000,000	DAU		100 Orang	Rp50,000,000
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan	Kabupaten Pamekasan	1 IUJK	1 IUJK	Rp50,000,000	Rp50,000,000	DAU		-	Rp0
1.03.11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah penerbitan rekomendasi teknis IUJK nasional yang difasilitasi	Kabupaten Pamekasan	100 Badan Usaha	100 Badan Usaha	Rp50,000,000	Rp50,000,000	DAU		0	Rp0
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi	Kabupaten Pamekasan							28,57%	Rp175,000,000
1.03.11.2.04.01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP yang disusun	Kabupaten Pamekasan							1 Dokumen	Rp25,000,000
1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta Bimbingan Teknis yang memahami tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Kabupaten Pamekasan							100 Orang	Rp100,000,000
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah badan usaha jasa konstruksi yang diawasi dan dievaluasi, tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Kabupaten Pamekasan							50 Badan Usaha Jasa Konstruksi	Rp50,000,000

1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					Rp18,109,381,911	Rp18,956,527,228				Rp33,312,351,579
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Kabupaten Pamekasan	100%	100%	Rp106,647,500	Rp97,144,000	DAU		100%	Rp97,047,500
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Kabupaten Pamekasan	6 Perencanaan	4 Perencanaan	Rp106,647,500	Rp97,144,000	DAU		4 Perencanaan	Rp97,047,500
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Kabupaten Pamekasan	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp50,000,000	Rp50,000,000	DAU		2 Dokumen	Rp50,000,000
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang dilaksanakan	Kabupaten Pamekasan	1 Dokumen Data	1 Dokumen Data			DAU		1 Dokumen Data	
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	Kabupaten Pamekasan	40 Dokumen	39 Dokumen	Rp5,247,500	Rp5,247,500	DAU		77 Dokumen	Rp5,247,500
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	Kabupaten Pamekasan	20 dokumen		Rp4,800,000		DAU		-	Rp0
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan	Kabupaten Pamekasan	40 dokumen	18 dokumen	Rp4,800,000	Rp4,800,000	DAU		24 dokumen	Rp4,800,000
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD yang dilaksanakan	Kabupaten Pamekasan	20 dokumen	0	Rp4,800,000	Rp0	DAU		-	Rp0

1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	Kabupaten Pamekasan	3 dokumen	3 dokumen	Rp37,000,000	Rp37,096,500	DAU		3 dokumen	Rp37,000,000
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Kabupaten Pamekasan	100%	100%	Rp2,574,764,130	Rp1,859,061,952	DAU		100%	Rp3,093,906,530
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Kabupaten Pamekasan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Rp2,574,764,130	Rp1,859,061,952	DAU		1 Unit Kerja	Rp3,093,906,530
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	Kabupaten Pamekasan	14 Bulan	14 Bulan	Rp2,574,764,130	Rp1,859,061,952	DAU		14 Bulan	Rp3,093,906,530
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Kabupaten Pamekasan	0.8	0.8	Rp217,714,800	Rp148,980,000	DAU		80%	Rp118,530,000
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	Kabupaten Pamekasan	53 Aparatur	53 Aparatur	Rp217,714,800	Rp148,980,000	DAU		53 Aparatur	Rp118,530,000
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Kabupaten Pamekasan	53 Pakaian Dinas	-	Rp68,734,800	Rp0	DAU		-	Rp0
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Kabupaten Pamekasan	53 Aparatur	53 Aparatur	Rp148,980,000	Rp148,980,000	DAU		53 Aparatur	Rp118,530,000
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Sarana Prasarana yang terpenuhi	Kabupaten Pamekasan	100%	100%	Rp1,281,120,609	Rp1,322,206,626	DAU		100%	Rp1,847,955,387
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Kabupaten Pamekasan	6 Sarana	6 Sarana	Rp310,829,169	Rp268,060,850	DAU		6 Sarana	Rp351,173,719
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	12 komponen	12 komponen	Rp5,760,000	Rp5,760,000	DAU		12 Komponen	Rp5,760,000

1.04.01.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	50 Peralatan Kantor	55 Peralatan Kantor	Rp34,442,169	Rp34,442,100	DAU		51 Peralatan Kantor	Rp41,011,969
		Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia	Kabupaten Pamekasan	20 Alat Kebersihan	17 Alat Kebersihan					16 Alat Kebersihan	
1.04.01.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	12 bulan	12 bulan	Rp39,700,000	Rp45,340,000	DAU		12 Bulan	Rp39,700,000
1.04.01.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	6 Barang	6 Barang	Rp37,787,000	Rp37,868,750	DAU		6 Barang	Rp37,721,750
1.04.01.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan	80 Kali	80 Kali	Rp226,140,000	Rp144,650,000	DAU		80 Kali	Rp226,980,000
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Kabupaten Pamekasan	1 Prasarana	1 Prasarana	Rp260,773,600	Rp325,269,700	DAU		3 Prasarana	Rp623,182,600
1.04.01.2.07 .01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Kabupaten Pamekasan					DAU		1 Kendaraan	Rp330,093,500
1.04.01.2.07 .02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Kabupaten Pamekasan					DAU		5 Kendaraan	Rp118,123,500
1.04.01.2.07 .10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	Kabupaten Pamekasan	66 unit	98 unit	Rp260,773,600	Rp325,269,700	DAU		27 unit	Rp174,965,600
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	3 Jasa Penunjang	3 Jasa Penunjang	Rp506,632,440	Rp517,727,640	DAU		3 Jasa Penunjang	Rp634,939,068
1.04.01.2.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	2 Jasa Layanan	2 Jasa Layanan	Rp4,125,000	Rp4,125,000	DAU		2 Jasa Layanan	Rp8,375,000
1.04.01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	6 Jasa Layanan	6 Jasa Layanan	Rp76,357,440	Rp76,352,640	DAU		6 Jasa Layanan	Rp70,664,068
1.04.01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	11 Jasa Layanan	11 Jasa Layanan	Rp393,150,000	Rp437,250,000	DAU		11 Jasa Layanan	Rp555,900,000

1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Pamekasan	3 Pemeliharaan	3 Pemeliharaan	Rp202,885,400	Rp211,148,436	DAU		3 Pemeliharaan	Rp238,660,000
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kabupaten Pamekasan	5 Kendaraan	5 Kendaraan	Rp119,995,400	Rp128,263,436	DAU		5 Kendaraan	Rp119,921,000
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dikelola	Kabupaten Pamekasan	148 unit	147 unit	Rp28,820,000	Rp28,815,000	DAU		148 unit	Rp28,789,000
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Kabupaten Pamekasan	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	Rp54,070,000	Rp54,070,000	DAU		19 Ruang	Rp89,950,000
		Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara / direhabilitasi	Kabupaten Pamekasan	1 Rumah Dinas	1 Rumah Dinas						
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	Kabupaten Pamekasan	89%	89%	Rp4,979,134,872	Rp2,838,234,650	DAU + DAK		92%	Rp12,604,920,000
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	Kabupaten Pamekasan							50%	Rp1,035,000,000
1.04.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik yang dilakukan	Kabupaten Pamekasan							1 Paket	Rp300,000,000
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang disusun	Kabupaten Pamekasan							1 Dokumen	Rp650,000,000

1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan							1 Paket	Rp85,000,000
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya	Kabupaten Pamekasan	1 Kawasan	1 Kawasan	Rp349,999,900	Rp349,999,900	DAU		1 Kawasan	Rp350,000,000
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun	Kabupaten Pamekasan	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp349,999,900	Rp349,999,900	DAU		3 Dokumen	Rp350,000,000
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya	Kabupaten Pamekasan	3 Kawasan	2 Peningkatan Kualitas	Rp4,629,134,972	Rp2,488,234,750	DAU + DAK		2 Peningkatan Kualitas	Rp11,219,920,000
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Kabupaten Pamekasan	61 Orang	61 Unit	Rp1,275,260,000	Rp1,275,260,000	DAK		270 Unit	Rp9,962,420,000
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU yang dikerjakamkan	Kabupaten Pamekasan	244.75 Ha		Rp2,349,999,972		DAU		-	Rp0
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan	5 unit	3 Koordinasi	Rp1,003,875,000	Rp1,212,974,750	DAU		3 Koordinasi	Rp1,257,500,000
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase Rumah Layak Huni dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	Kabupaten Pamekasan	14 unit	95,80%	Rp8,950,000,000	Rp12,635,000,000	DAU		96,04%	Rp13,142,500,000
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan	Kabupaten Pamekasan	5 Koordinasi	1 Perbaikan RTLH	Rp8,950,000,000	Rp12,635,000,000	DAU		1 Perbaikan RTLH	Rp13,142,500,000

1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	Kabupaten Pamekasan	500 Orang	722 Unit	Rp8,750,000,000	Rp12,635,000,000	DAU		751 Orang	Rp13,142,500,000
1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	jumlah perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha yang dikerjasamakan	Kabupaten Pamekasan	20 Orang		Rp200,000,000		DAU		-	Rp0
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang ditingkatkan	Kabupaten Pamekasan		33,33%	Rp0	Rp55,900,000	DAU		66,66%	Rp100,000,000
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Kabupaten Pamekasan		11,11%	Rp0	Rp55,900,000	DAU		44,44%	Rp100,000,000
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang dilakukan	Kabupaten Pamekasan		1 PSU	Rp0	Rp55,900,000	DAU		2 PSU	Rp100,000,000
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Rumah Layak Huni	Kabupaten Pamekasan					DAU		96,04%	Rp2,307,492,162
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah data rumah korban bencana atau relokasi program yang disediakan	Kabupaten Pamekasan					DAU		6 Pendataan	Rp599,999,580
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program yang diidentifikasi	Kabupaten Pamekasan					DAU		2 Kecamatan	Rp99,999,930

1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	jumlah lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan yang diidentifikasi	Kabupaten Pamekasan					DAU		2 Kecamatan	Rp99,999,930
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	jumlah data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani yang disediakan	Kabupaten Pamekasan					DAU		2 Kecamatan	Rp99,999,930
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	jumlah data tingkat kerusakan rumah akibat bencana yang disediakan	Kabupaten Pamekasan					DAU		2 Kecamatan	Rp99,999,930
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah data penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program yang disediakan	Kabupaten Pamekasan					DAU		2 Kecamatan	Rp99,999,930
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	jumlah data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus yang disediakan	Kabupaten Pamekasan					DAU		2 Kecamatan	Rp99,999,930
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan					DAU		40,39%	Rp1,507,499,990
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	jumlah rumah bagi korban bencana yang diperbaiki	Kabupaten Pamekasan					DAU		41 Unit	Rp717,500,000
1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah dokumen site plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang disusun	Kabupaten Pamekasan					DAU		1 Dokumen	Rp49,999,990
1.04.02.2.03.03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	jumlah lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana yang diadakan	Kabupaten Pamekasan					DAU		1 Unit	Rp100,000,000
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	jumlah rumah bagi korban bencana yang dibangun	Kabupaten Pamekasan					DAU		10 Unit	Rp300,000,000
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah rumah khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program yang dibangun	Kabupaten Pamekasan					DAU		10 Unit	Rp300,000,000

1.04.02.2.03 .06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten/kota yang dipelihara	Kabupaten Pamekasan					DAU		40 Unit	Rp40,000,000
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan	Kabupaten Pamekasan					DAU		25%	Rp100,000,000
1.04.02.2.06 .01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	jumlah penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang difasilitasi	Kabupaten Pamekasan					DAU		5 Izin	Rp50,000,000
1.04.02.2.06 .03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	jumlah Pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan yang dikoordinasikan	Kabupaten Pamekasan					DAU		5 Koordinasi	Rp50,000,000
1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah sertifikat kepemilikan bangunan gedung yang diterbitkan	Kabupaten Pamekasan					DAU		50 Unit	Rp99,992,592
1.04.02.2.07 .01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	jumlah Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) yang dikoordinasikan	Kabupaten Pamekasan					DAU		100 Unit	Rp99,992,592

➤ Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dan Perubahannya



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHARRAM, ST

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Jabatan : Bupati Pamekasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 27 Februari 2021

Pihak Kedua

H. BADRUT TAMAM, S.Psi

Pihak Pertama

MUHARRAM, ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Persentase pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	59,52 %
2.	Meningkatnya Kualitas perumahan dan bangunan gedung sesuai standar	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	97,17 %
		Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung	1,15 %
		Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas / Laik Fungsi	24 %
3.	Meningkatnya Penyehatan lingkungan permukiman	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	84.03%
		Prosentase Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	54,53%
		Prosentase Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	64,65%
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP OPD	A

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum	34,204,475,200	APBD + APBN
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	17,637,779,000	APBD + APBN
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	14,439,999,575	APBD
4.	Program Pengembangan Permukiman	54,277,999,408	APBD
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	7,444,172,338	APBD
6.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	21,099,999,680	APBD
7.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	250,000,000	APBD
8.	Program Kawasan Permukiman	4,979,134,872	APBD + APBN
9.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	8,950,000,000	APBD
JUMLAH		163.283.560.073	APBD + APBN

Pamekasan, 27 Februari 2021

Pihak Kedua

BUPATI PAMEKASAN



H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Pihak Pertama

KEPALA DINAS
 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN
 KABUPATEN PAMEKASAN



MUHARRAM, ST



**PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN ANGGARAN KEGIATAN (PAK)
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHARRAM, ST

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Jabatan : Bupati Pamekasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua

H. BADRUT TAMAM, S.Psi

Pihak Pertama

MUHARRAM, ST

PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN ANGGARAN KEGIATAN (PAK) TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	67,83%
		Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	20%
2	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,37%
		Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	63,03%
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	55,53%
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	65,65%
3	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A

**PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum	Rp 44.604.474.061	APBD + APBN
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 17.537.779.000	APBD + APBN
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 4.924.999.999	APBD
4.	Program Pengembangan Permukiman	Rp 84.514.474.480	APBD
5.	Program Kawasan Permukiman	Rp 2.838.234.650	APBD + APBN
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 200.000.000	APBD
7.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 12.635.000.000	APBD
8.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp 31.549.439.350	APBD
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 250.000.000	APBD
10.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 55.900.000	APBD
JUMLAH		Rp203.610.761.472	APBD+APBN

Pamekasan, 29 Oktober 2021

Pihak Kedua

BUPATI PAMEKASAN


H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Pihak Pertama

KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN


MUHARRAM, ST

➤ Laporan Evaluasi Hasil Renja s.d. Triwulan IV

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (%)	
					I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 5+6+7+8		10=9/4*100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	59.73 %	Rp207,038,154,050	2.68 %	Rp442,838,301	3.72 %	Rp5,489,710,609	36.43 %	Rp104,724,917,714	14.21 %	Rp72,280,935,974	57.05 %	Rp182,938,402,598	95.52 %	88.36%
2	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	85.00	Rp3,427,392,578		Rp442,838,301		Rp780,707,011		Rp661,789,201		Rp1,065,353,560	83.69	Rp2,950,688,073	98.46 %	86.09%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	Rp97,144,000	90.48	Rp0	0 %	Rp5,617,800	0 %	Rp21,520,550	7.94 %	Rp18,625,000	98 %	Rp45,763,350	98.42 %	47.11%
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	4 Perencanaan	Rp97,144,000	2 Perencanaan	Rp0	0 Perencanaan	Rp5,617,800	0 Perencanaan	Rp21,520,550	2 Perencanaan	Rp18,625,000	4 Perencanaan	Rp45,763,350	100.00 %	47.11%
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	3 Dokumen	Rp50,000,000	0 Dokumen	Rp0	0 Dokumen	Rp2,559,600	0 Dokumen	Rp16,914,500	2 Dokumen	Rp8,597,600	2 Dokumen	Rp28,071,700	66.67 %	56.14%
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	40 Dokumen	Rp5,247,500	39 Dokumen	Rp0	0 Dokumen	Rp954,000	0 Dokumen	Rp1,431,000	1 Dokumen	Rp2,385,000	40 Dokumen	Rp4,770,000	100.00 %	90.90%
7	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan	18 dokumen	Rp4,800,000	18 dokumen	Rp0	0 dokumen	Rp872,000	0 dokumen	Rp1,308,000	0 dokumen	Rp2,179,900	18 dokumen	Rp4,359,900	100.00 %	90.83%

8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	3 dokumen	Rp37,096,500	0 dokumen	Rp0	0 dokumen	Rp1,232,200	0 dokumen	Rp1,867,050	3 dokumen	Rp5,462,500	3 dokumen	Rp8,561,750	100.00 %	23.08%
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	Rp1,859,061,952	21.43 %	Rp384,326,242	35.71 %	Rp565,762,479	21.43 %	Rp343,367,475	21.43 %	Rp437,657,794	100 %	Rp1,731,113,990	100.00 %	93.12%
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 Unit Kerja	Rp1,859,061,952	1 Unit Kerja	Rp384,326,242	1 Unit Kerja	Rp565,762,479	1 Unit Kerja	Rp343,367,475	1 Unit Kerja	Rp437,657,794	1 Unit Kerja	Rp1,731,113,990	100.00 %	93.12%
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	14 Bulan	Rp1,859,061,952	3 Bulan	Rp384,326,242	5 Bulan	Rp565,762,479	3 Bulan	Rp343,367,475	3 Bulan	Rp437,657,794	14 Bulan	Rp1,731,113,990	100.00 %	93.12%
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	80 %	Rp148,980,000	4.53 %	Rp0	0 %	Rp0	31.70 %	Rp59,758,000	13.58 %	Rp26,192,000	50 %	Rp85,950,000	62.26 %	57.69%
13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	53 Aparatur	Rp148,980,000	3 Aparatur	Rp0	0 Aparatur	Rp0	21 Aparatur	Rp59,758,000	9 Aparatur	Rp26,192,000	33 Aparatur	Rp85,950,000	62.26 %	57.69%
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	53 Aparatur	Rp148,980,000	3 Aparatur	Rp0	0 Aparatur	Rp0	21 Aparatur	Rp59,758,000	9 Aparatur	Rp26,192,000	33 Aparatur	Rp85,950,000	62.26 %	57.69%
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	100 %	Rp1,322,206,626	5.50 %	Rp58,512,059	15.83 %	Rp209,326,732	16.97 %	Rp237,143,176	49.31 %	Rp582,878,766	87.61 %	Rp1,087,860,733	87.61 %	82.28%

16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	6	Sarana	Rp268,060,850	0	Sarana	Rp0	2	Sarana	Rp40,589,078	5	Sarana	Rp29,746,800	5	Sarana	Rp85,901,150	5	Sarana	Rp156,237,028	83.33 %	58.28%
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	komp onen	Rp5,760,000	0	komp onen	Rp0	0	komp onen	Rp0	2	komp onen	Rp691,300	6	komp onen	Rp2,780,550	8	komp onen	Rp3,471,850	66.67 %	60.28%
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	66	Peralatan	Rp34,442,100	0	Peralatan	Rp0	0	Peralatan	Rp0	17	Peralatan	Rp8,746,400	24	Peralatan	Rp12,728,100	41	Peralatan	Rp21,474,500	62.12 %	62.35%
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12	bulan	Rp45,340,000	0	bulan	Rp0	0	bulan	Rp0	3	bulan	Rp7,748,500	3	bulan	Rp12,361,500	6	bulan	Rp20,110,000	50.00 %	44.35%
20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6	Barang	Rp37,868,750	0	Barang	Rp0	1	Barang	Rp1,632,200	1	Barang	Rp2,910,600	3	Barang	Rp21,729,000	5	Barang	Rp26,271,800	83.33 %	69.38%
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	60	Kali	Rp144,650,000	0	Kali	Rp0	12	Kali	Rp38,956,878	3	Kali	Rp9,650,000	20	Kali	Rp36,302,000	35	Kali	Rp84,908,878	58.33 %	58.70%
22	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	1	Prasarana	Rp325,269,700	0	Prasarana	Rp0	0	Prasarana	Rp0	1	Prasarana	Rp75,820,000	1	Prasarana	Rp232,188,000	1	Prasarana	Rp308,008,000	100.00 %	94.69%
25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	98	unit	Rp325,269,700	0	unit	Rp0	0	unit	Rp0	27	unit	Rp75,820,000	65	unit	Rp232,188,000	92	unit	Rp308,008,000	93.88 %	94.69%
26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	3	Jasa Penunjang	Rp517,727,640	3	Jasa Penunjang	Rp58,512,059	3	Jasa Penunjang	Rp138,645,954	3	Jasa Penunjang	Rp121,466,376	3	Jasa Penunjang	Rp163,810,441	3	Jasa Penunjang	Rp482,434,830	100.00 %	93.18%
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	2	Jasa Layanan	Rp4,125,000	0	Jasa Layanan	Rp0	0	Jasa Layanan	Rp0	2	Jasa Layanan	Rp862,400	2	Jasa Layanan	Rp3,227,600	2	Jasa Layanan	Rp4,090,000	100.00 %	99.15%

28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik yang disediakan	6	Jasa Layan an	Rp76,35 2,640	6	Jasa Layana n	Rp6,2 22,55 9	6	Jasa Laya nan	Rp17,83 3,754	6	Jasa Layan an	Rp18,47 2,476	6	Jasa Laya nan	Rp19,7 89,663	6	Jasa Laya nan	Rp62,318, 452	100.00 %	81.62%
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	11	Jasa Layan an	Rp437,2 50,000	11	Jasa Laya nan	Rp52, 289,5 00	11	Jasa Laya nan	Rp120,8 12,200	1	Jasa Layan an	Rp102,1 31,500	11	Jasa Layan an	Rp140, 793,17 8	11	Jasa Laya nan	Rp416,02 6,378	100.00 %	95.15%
30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	3	Peme lihara an	Rp211, 148,436	2	Pemeli haraan	Rp0	1	Peme lihar aan	Rp30,09 1,700	0	Pemel iharaa n	Rp10,1 10,000	3	Peme lihara an	Rp100, 979,17 5	3	Pem eliha raan	Rp141,18 0,875	100.00 %	66.86%
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	5	Kend araan	Rp128,2 63,436	0	Kendar aan	Rp0	0	Kend araan	Rp21,97 1,700	2	Kenda raan	Rp10,11 0,000	2	Kenda raan	Rp48,9 92,675	4	Kend araa n	Rp81,074, 375	80.00 %	63.21%
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dikelola	139	unit	Rp28,81 5,000	0	unit	Rp0	39	unit	Rp8,120, 000	0	unit	Rp0	59	unit	Rp10,8 98,000	98	unit	Rp19,018, 000	70.50 %	66.00%
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	19	Ruan g	Rp54,07 0,000	1	Ruang	Rp0	0	Ruan g	Rp0	0	Ruang	Rp0	14	Ruang	Rp41,0 88,500	15	Ruan g	Rp41,088, 500	78.95 %	75.99%
34	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan	55.53	%	Rp44,6 04,474, 061	4.32	%	Rp0	2.492	%	Rp1,266, 118,200	21. 78	%	Rp13,1 56,876, 313	23.95	%	Rp25,4 95,524, 988	53	%	Rp39,918 ,519,501	94.63 %	89.49%
35	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	80	%	Rp44,6 04,474, 061	6.23	%	Rp0	3.5 9	%	Rp1,266, 118,200	31. 38	%	Rp13,1 56,876, 313	34.50	%	Rp25,4 95,524, 988	76	%	Rp39,918 ,519,501	94.63 %	89.49%

36	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan	7 SPA M	Rp44,604,474,061	2 SPA M	Rp0	2 SPA M	Rp1,266,118,200	4 SPA M	Rp13,156,876,313	5 SPAM	Rp25,495,524,988	7 SPA M	Rp39,918,519,501	100.00 %	89.49%
37	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, Strategi dan teknis SPAM yang disusun	2 dokumen	Rp199,999,726	0 dokumen	Rp0	0 dokumen	Rp0	1 dokumen	Rp51,812,000	1 dokumen	Rp140,042,600	2 dokumen	Rp191,854,600	100.00 %	95.93%
39	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang dibangun di kawasan perdesaan	311 Dusun	Rp37,024,999,851	23 Dusun	Rp0	8 Dusun	Rp0	126 Dusun	Rp11,354,496,900	137 Dusun	Rp22,174,295,178	294 Dusun	Rp33,528,792,078	94.53 %	90.56%
41	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah SPAM di kawasan perdesaan yang ditingkatkan kualitasnya	1 Desa	Rp2,642,750,874	0 Desa	Rp0	0 Desa	Rp0	0 Desa	Rp636,807,413	1 Desa	Rp1,146,253,343	1 Desa	Rp1,783,060,756	100.00 %	67.47%
43	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan yang diperbaiki	10 Desa	Rp1,100,000,939	0 Desa	Rp0	0 Desa	Rp0	2 Desa	Rp0	7 Desa	Rp1,061,758,700	9 Desa	Rp1,061,758,700	90.00 %	96.52%
44	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	jumlah penerima SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat yang dibina dan diawasi	5 KKM	Rp1,494,999,900	0 KKM	Rp0	0 KKM	Rp0	3 KKM	Rp530,119,000	1 KKM	Rp803,775,000	4 KKM	Rp1,333,894,000	80.00 %	89.22%
45	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Jumlah pelaksanaan kerjasama SPAM yang dibina dan diawasi	1 unit	Rp50,000,000	0 unit	Rp0	0 unit	Rp0	1 unit	Rp0	0 unit	Rp37,690,000	1 unit	Rp37,690,000	100.00 %	75.38%
47	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang diperluas di kawasan perdesaan	10 Desa	Rp2,091,722,771	3 Desa	Rp0	7 Desa	Rp1,266,118,200	0 Desa	Rp583,641,000	0 Desa	Rp131,710,167	10 Desa	Rp1,981,469,367	100.00 %	94.73%

49	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan	65.65 %	Rp22,462,778,999	0 %	Rp0	0.78 %	Rp3,272,335,398	34.39 %	Rp8,438,548,600	27.35 %	Rp10,221,042,600	62.52 %	Rp21,931,926,598	95.23 %	97.64%
50	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangkan	65.65 %	Rp17,537,779,000	0 %	Rp0	1.34 %	Rp3,272,335,398	33.49 %	Rp7,581,058,200	28.14 %	Rp6,477,113,500	62.97 %	Rp17,330,507,098	95.92 %	98.82%
51	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan	2 SPAL D	Rp17,537,779,000	0 SPAL D	Rp0	1 SPAL D	Rp3,272,335,398	2 SPAL D	Rp7,581,058,200	2 SPAL D	Rp6,477,113,500	2 SPAL D	Rp17,330,507,098	100.00 %	98.82%
53	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala yang direhabilitasi/ditingkatkan	19 Desa	Rp3,136,650,000	0 Desa	Rp0	0 Desa	Rp0	4 Desa	Rp819,212,000	13 Desa	Rp2,110,692,700	17 Desa	Rp2,929,904,700	89.47 %	93.41%
59	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sistem pengelolaan air limbah terpusat yang dibangun	30 Desa	Rp14,401,129,000	0 Desa	Rp0	1 Desa	Rp3,272,335,398	21 Desa	Rp6,761,846,200	8 Desa	Rp4,366,420,800	30 Desa	Rp14,400,602,398	100.00 %	100.00 %
65	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase yang Dikelola dan Dikembangkan	49.25 %	Rp4,924,999,999	0 %	Rp0	0 %	Rp0	26.7 %	Rp857,490,400	19.7 %	Rp3,743,929,100	46.44 %	Rp4,601,419,500	94.29 %	93.43%
66	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan	1 Sistem Drainase	Rp4,924,999,999	0 Sistem Drainase	Rp0	0 Sistem Drainase	Rp0	1 Sistem Drainase	Rp857,490,400	1 Sistem Drainase	Rp3,743,929,100	1 Sistem Drainase	Rp4,601,419,500	100.00 %	93.43%
68	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	jumlah saluran drainase lingkungan yang direhabilitasi	35 Desa	Rp4,924,999,999	0 Desa	Rp0	0 Desa	Rp0	19 Desa	Rp857,490,400	14 Desa	Rp3,743,929,100	33 Desa	Rp4,601,419,500	94.29 %	93.43%

70	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	63.03 %	Rp84,864,474,380	0.40 %	Rp0	2.79 %	Rp0	50.82 %	Rp52,310,820,200	8.09 %	Rp19,279,267,770	62.10 %	Rp71,590,087,970	98.53 %	84.36%
71	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman yang Dikembangkan	60 %	Rp84,514,474,480	0.38 %	Rp0	2.65 %	Rp0	48.38 %	Rp52,310,820,200	7.71 %	Rp18,947,687,070	59.12 %	Rp71,258,507,270	98.53 %	84.32%
72	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis yang diselenggarakan	1 Infrastruktur	Rp84,514,474,480	1 Infrastruktur	Rp0	1 Infrastruktur	Rp0	1 Infrastruktur	Rp52,310,820,200	1 Infrastruktur	Rp18,947,687,070	1 Infrastruktur	Rp71,258,507,270	100.00 %	84.32%
73	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis yang dibangun dan dikembangkan	475 Unit	Rp84,514,474,480	3 Unit	Rp0	21 Unit	Rp0	383 Unit	Rp52,310,820,200	61 Unit	Rp18,947,687,070	468 Unit	Rp71,258,507,270	98.53 %	84.32%
96	Meningkatnya lingkungan permukiman yang sehat	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	97.37 %	Rp15,123,234,750	7.80 %	Rp0	15.72 %	Rp170,550,000	56.61 %	Rp12,434,681,900	16.22 %	Rp2,049,303,300	96.35 %	Rp14,654,535,200	98.95 %	96.90%
97	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	89.00 %	Rp2,838,234,650	6.64 %	Rp0	14.61 %	Rp170,550,000	65.09 %	Rp1,497,181,900	2.66 %	Rp770,884,000	89.00 %	Rp2,438,615,900	100.00 %	85.92%
102	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya	1 kawasan	Rp349,999,900	0 kawasan	Rp0	0 kawasan	Rp0	1 kawasan	Rp0	1 kawasan	Rp331,580,700	1 kawasan	Rp331,580,700	100.00 %	94.74%
104	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun	3 Dokumen	Rp349,999,900	0 Dokumen	Rp0	0 Dokumen	Rp0	2 Dokumen	Rp0	1 Dokumen	Rp331,580,700	3 Dokumen	Rp331,580,700	100.00 %	94.74%

106	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya	2 Peningkatan Kualitas	Rp2,488,234,750	2 Peningkatan Kualitas	Rp0	2 Peningkatan Kualitas	Rp170,550,000	2 Peningkatan Kualitas	Rp1,497,181,900	1 Peningkatan Kualitas	Rp439,303,300	2 Peningkatan Kualitas	Rp2,107,035,200	100.00 %	84.68%
108	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	61 Unit	Rp1,275,260,000	5 Unit	Rp0	11 Unit	Rp16,800,000	45 Unit	Rp1,221,142,000	0 Unit	Rp35,080,000	61 Unit	Rp1,273,022,000	100.00 %	99.82%
109	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan	3 Koordinasi	Rp1,212,974,750	0 Koordinasi	Rp0	0 Koordinasi	Rp153,750,000	2 Koordinasi	Rp276,039,900	1 Koordinasi	Rp404,223,300	3 Koordinasi	Rp834,013,200	100.00 %	68.76%
113	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase Rumah Layak Huni dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	95.80 %	Rp12,635,000,000	7.37 %	Rp0	15.39 %	Rp0	54.40 %	Rp10,937,500,000	12.74 %	Rp1,610,000,000	89.90 %	Rp12,547,500,000	93.84 %	99.31%
114	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan	1 Perbaikan RTLH	Rp12,635,000,000	1 Perbaikan RTLH	Rp0	1 Perbaikan RTLH	Rp0	1 Perbaikan RTLH	Rp10,937,500,000	1 Perbaikan RTLH	Rp1,610,000,000	1 Perbaikan RTLH	Rp12,547,500,000	100.00 %	99.31%
115	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	722 Unit	Rp12,635,000,000	58 Unit	Rp0	116 Unit	Rp0	410 Unit	Rp10,937,500,000	133 Unit	Rp1,610,000,000	717 Unit	Rp12,547,500,000	99.31 %	99.31%

116	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung	67.83 %	Rp255,900,000	3.39 %	Rp0	0 %	Rp0	54.26 %	Rp50,187,500	10.17 %	Rp64,974,856	67.83 %	Rp115,162,356	100 %	45.00%
117	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang tertata	26 %	Rp200,000,000	1.3 %	Rp0	0 %	Rp0	20.80 %	Rp50,187,500	3.90 %	Rp54,099,856	26 %	Rp104,287,356	100 %	52.14%
118	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan	2 Penyelenggaraan	Rp200,000,000	1 Penyelenggaraan	Rp0	0 Penyelenggaraan	Rp0	1 Penyelenggaraan	Rp50,187,500	1 Penyelenggaraan	Rp54,099,856	2 Penyelenggaraan	Rp104,287,356	100.00 %	52.14%
119	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penerbitan IMB, SLF peran TABG, Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG yang diselenggarakan	200 Unit	Rp200,000,000	10 Unit	Rp0	0 Unit	Rp0	160 Unit	Rp50,187,500	30 Unit	Rp54,099,856	200 Unit	Rp104,287,356	100.00 %	52.14%
120	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang ditingkatkan	33.33 %	Rp55,900,000	0 %	Rp0	0 %	Rp0	0 %	Rp0	33.33 %	Rp10,875,000	33.33 %	Rp10,875,000	100.00 %	19.45%
121	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	11.11 %	Rp55,900,000	0 %	Rp0	0 %	Rp0	0 %	Rp0	11.11 %	Rp10,875,000	11.11 %	Rp10,875,000	100.00 %	19.45%
122	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah PSU perumahan yang diserahkan oleh pihak pengembang kepada Pemkab	1 PSU	Rp55,900,000	0 PSU	Rp0	0 PSU	Rp0	0 PSU	Rp0	1 PSU	Rp10,875,000	1 PSU	Rp10,875,000	100.00 %	19.45%

123	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas / Laik Fungsi	20 %	Rp36,299,899,282	0.70 %	Rp0	1.28 %	Rp0	7.70 %	Rp17,672,014,000	2.18 %	Rp14,105,468,900	11.86 %	Rp31,777,482,900	59.30 %	87.54%
124	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan	2 Peny eleng garaa n	Rp4,500,459,932	0 Peny elen ggar aan	Rp0	0 Peny eleng garaa n	Rp0	1 Penye lengg araan	Rp706,658,000	1 Penye lengg araan	Rp3,236,536,450	2 Peny elen ggar aan	Rp3,943,194,450	100.00 %	87.62%
125	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang disusun jumlah sarana dan prasarana pendukung bangunan gedung kantor jumlah gedung kantor/instansi pemerintah daerah yang dibangun diawasi dan dimanfaatkan	14 Unit	Rp4,500,459,932	0 Unit	Rp0	0 Unit	Rp0	7 Unit	Rp706,658,000	4 Unit	Rp3,236,536,450	11 Unit	Rp3,943,194,450	78.57 %	87.62%
126	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	38.5 %	Rp31,549,439,350	1.93 %	Rp0	1.93 %	Rp0	29.07 %	Rp16,960,411,000	1.73 %	Rp10,810,221,500	34.65 %	Rp27,770,632,500	90.01 %	88.02%
127	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan	1 Penat aan Bang unan	Rp31,549,439,350	1 Pena taan Bang unan	Rp0	1 Pena taan Bang unan	Rp0	1 Pen ata an Ban gun an	Rp16,960,411,000	1 Penat aan Bang unan	Rp10,810,221,500	1 Pena taan Bang unan	Rp27,770,632,500	100.00 %	88.02%

128	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata	200 Unit	Rp31,549,439,350	10 Unit	Rp0	10 Unit	Rp0	152 Unit	Rp16,960,411,000	9 Unit	Rp10,810,221,500	181 Unit	Rp27,770,632,500	90.50 %	88.02%
129	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil yang Bersertifikat di Bidang Jasa Konstruksi	24 %	Rp250,000,000	0.64 %	Rp0	1.84 %	Rp0	3.12 %	Rp4,945,000	3.44 %	Rp58,710,950	9.04 %	Rp63,655,950	37.67 %	25.46%
130	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan	2 Penyelenggaraan	Rp200,000,000	2 Penyelenggaraan	Rp0	2 Penyelenggaraan	Rp0	2 Penyelenggaraan	Rp999,000	2 Penyelenggaraan	Rp39,194,350	2 Penyelenggaraan	Rp40,193,350	100.00 %	20.10%
131	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang dilaksanakan	100 Orang	Rp150,000,000	1 Orang	Rp0	4 Orang	Rp0	11 Orang	Rp999,000	10 Orang	Rp35,394,350	26 Orang	Rp36,393,350	26.00 %	24.26%
132	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil yang bersertifikat	100 Orang	Rp50,000,000	1 Orang	Rp0	4 Orang	Rp0	11 Orang	Rp0	10 Orang	Rp3,800,000	26 Orang	Rp3,800,000	26.00 %	7.60%
133	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan	1 IUJK	Rp50,000,000	1 IUJK	Rp0	1 IUJK	Rp0	1 IUJK	Rp3,946,000	1 IUJK	Rp19,516,600	1 IUJK	Rp23,462,600	100.00 %	46.93%
134	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah penerbitan rekomendasi teknis IUJK nasional yang difasilitasi	100 Badan Usaha	Rp50,000,000	6 Badan Usaha	Rp0	15 Badan Usaha	Rp0	17 Badan Usaha	Rp3,946,000	23 Badan Usaha	Rp19,516,600	61 Badan Usaha	Rp23,462,600	61.00 %	46.93%